



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57/PERMEN-KP/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 17/PERMEN-KP/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan program dukungan manajemen terkait sasaran program tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Sekretariat Jenderal, dan perubahan level sasaran program pengelolaan perikanan pada program kegiatan lembaga pengelola modal kelautan dan perikanan dalam matrik kerangka pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, perlu dilakukan perubahan matrik kerangka pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan

2020-2024 dalam lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 17/PERMEN-KP/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1322

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Mariani



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57/PERMEN-KP/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 17/PERMEN-
KP/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN
2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan dapat direview sesuai aturan yang berlaku.

RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra K/L 2020-2024.

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian indikator pembangunan dalam RPJPN, dimana ditargetkan pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, dan kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;

4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan nasional tersebut, terdiri dari:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan kemananan, dan transformasi pelayanan publik.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:

1. membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan; dan
2. memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Untuk itu, pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 akan menjabarkan agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden tersebut kedalam program-program pembangunan antara lain untuk kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan pekerjaan, dan peningkatan devisa negara.

B. Kondisi Umum

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 dilaksanakan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, capaian KKP dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 antara lain:

1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) adalah salah satu ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang akan diukur dengan menggunakan dua variabel pokok yaitu ekonomi dan sosial. Pada tahun 2015 realisasi IKMKP mencapai 45,12 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 57,66. Indikator dimensi ekonomi yang digunakan mencakup Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Usaha Pembudi Daya (NTUPi), Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP), dan Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG). Indikator dimensi sosial dan kelembagaan meliputi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan, jumlah kelompok kelautan dan perikanan yang meningkat kelasnya, dan jumlah kelompok kelautan dan perikanan yang disuluh.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada tahun 2015 mencapai 106,14 dan pada tahun 2019 meningkat mencapai 113,74. Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan (NTPi) pada tahun 2016 mencapai 98,96 dan pada tahun 2019 meningkat mencapai 102,09. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) pada tahun 2016 mencapai 102,38 dan pada tahun 2019 meningkat mencapai 103,53. Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) pada tahun 2015 mencapai 98,82 dan pada tahun 2018 meningkat mencapai 110,14, sedangkan pada tahun 2019 menjadi 91,19. Fluktuasi nilai NTN/NTUPi/NTPHP/NTPG antara lain dipengaruhi oleh faktor cuaca, faktor harga komoditas, indeks konsumsi rumah tangga, dan indeks biaya produksi, serta kenaikan inflasi.

2. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan tahun 2016 mencapai 5,19% dan tahun 2019 meningkat mencapai 5,81%. Pertumbuhan PDB Perikanan tersebut telah melampaui pertumbuhan PDB Kelompok Pertanian tahun 2019 yaitu sebesar 3,64% dan pertumbuhan PDB Nasional tahun 2019 yang besarnya 5,02%. Apabila dilihat dari besaran nilai ekonominya, PDB Perikanan tahun 2019 mencapai Rp252,5 triliun. Angka ini belum termasuk PDB dari industri pengolahan dan kegiatan perikanan lainnya di sektor hilir.
3. Produksi perikanan tahun 2015 mencapai 22,31 juta ton dan pada tahun 2019 meningkat mencapai 23,86 juta ton, yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 7,53 juta ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 16,33 juta ton (termasuk rumput laut). Produksi perikanan yang meningkat setiap tahun mendukung ketahanan pangan nasional terutama dalam penyediaan protein hewani untuk peningkatan gizi masyarakat, serta pencegahan dan penurunan *stunting*.
4. Produksi garam nasional tahun 2015 mencapai 2,48 juta ton dan pada tahun 2019 meningkat mencapai 2,85 juta ton. Capaian tersebut didukung oleh capaian produksi garam rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di 23 kabupaten/kota.
5. Nilai ekspor hasil perikanan tahun 2015 mencapai USD 3,95 miliar dan pada tahun 2019 meningkat mencapai USD 4,93 miliar. Capaian nilai ekspor tahun 2019 tersebut didominasi oleh komoditas udang sebesar USD 1,72 miliar, komoditas Tuna Tongkol Cakalang (TTC) sebesar USD 0,75 miliar, komoditas Cumi Sotong Gurita (CSG) sebesar USD 0,56 miliar, dan komoditas rajungan kepiting senilai USD 0,39 miliar. Peningkatan ekspor hasil perikanan didukung antara lain oleh keikutsertaan KKP dalam berbagai pameran internasional dan penguatan sistem karantina ikan dan jaminan mutu produk perikanan.
6. Tingkat konsumsi ikan pada tahun 2015 mencapai 41,11 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 54,49 kg/kapita/tahun. Capaian tersebut didukung oleh kampanye nasional Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang dilaksanakan di seluruh provinsi. Terdapat tiga pilar penyokong tingkat konsumsi ikan yakni penguatan *demand* melalui pertumbuhan permintaan ikan, penguatan *supply* melalui program

peningkatan tingkat produksi, dan penguatan kerja sama dengan mitra instansi pemerintah dan masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kegemaran masyarakat Indonesia dalam mengonsumsi ikan, serta berhasilnya program Gemarikan yang telah dilaksanakan.

7. Luas kawasan konservasi perairan pada tahun 2015 mencapai 17,30 juta hektar (ha) dan pada tahun 2019 meningkat mencapai 23,14 juta ha. Pencapaian tersebut merupakan keberhasilan KKP dalam penyampaian program kawasan konservasi sebagai prioritas nasional maupun global kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah mengalokasikan ruang lautnya sebagai kawasan konservasi. Selain itu juga didukung oleh kuatnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, K/L terkait, perguruan tinggi, mitra Lembaga Swadaya Masyarakat/*Non-Governmental Organization*, dan masyarakat.
8. Kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun 2019 mencapai 93,57%. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi pencegahan, pemantauan, pengawasan, dan penindakan di bidang kelautan dan perikanan. Fungsi pencegahan dilakukan melalui proses sosialisasi kepada masyarakat sekaligus pelibatan langsung melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Fungsi pemantauan dilakukan melalui berbagai media dan sarana termasuk melalui pengoperasian Pusat Pengendalian (Pusdal) yang memanfaatkan teknologi *Vessel Monitoring System* (VMS), *RadarSat*, dan sistem penginderaan jauh lainnya. Fungsi pengawasan dilakukan melalui aktivitas pemeriksaan kepatuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan oleh Pengawas Perikanan secara profesional. Sedangkan penindakan dilakukan melalui proses penyidikan dan penanganan barang bukti terhadap pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Seluruh fungsi tersebut berjalan sinergis dengan instansi penegak hukum lainnya melalui Satuan Tugas Pemberantasan *Illegal Fishing*.
9. Pada tahun 2019 operasional karantina ikan sebagai komponen *Customs Immigration and Quarantine* (CIQ) telah hadir di 31 lokasi perbatasan dari 43 lokasi perbatasan prioritas yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Dari 31 (tiga puluh satu) lokasi perbatasan tersebut diantaranya adalah di Pos Lintas

Batas Negara (PLBN) Jagoibabang, Aruk, dan Entikong di Kalimantan Barat, PLBN Matomasin, Matoain, dan Wini di Atambua, Nusa Tenggara Timur, PLBN Skow dan Sota di Papua. Untuk perbatasan laut yaitu PLBN Nunukan di Kalimantan Utara, PLBN Miangas dan Marore di Sulawesi Utara, PLBN Simeulue dan Sabang di Aceh, PLBN Natuna di Kepulauan Riau. Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan mengalami peningkatan sebesar 1,38% yaitu 78,52% di tahun 2018 menjadi 79,60 di tahun 2019.

10. Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) pada tahun 2019 telah mencapai kategori pra mandiri 3 (terbangun) untuk tiga SKPT yaitu Moa, Sabang, dan Rote Ndao, dan kategori pra mandiri 4 (terkelola) untuk sepuluh SKPT yaitu Natuna, Merauke, Saumlaki, Sebatik, Biak Numfor, Mimika, Morotai, Talaud, Mentawai, dan Sumba Timur. Beberapa SKPT sudah melakukan kegiatan lalu lintas ikan di domestik maupun ekspor, diantaranya SKPT Natuna, Mimika, Sebatik, Merauke, dan Morotai.
11. Pada tahun 2019, rekomendasi dan/atau inovasi penelitian dan pengembangan (litbang) yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan pada unit kerja eselon I KKP atau *stakeholders* lainnya mencapai 37 rekomendasi terdiri dari dua belas rekomendasi pada bidang Riset Perikanan, tiga rekomendasi pada bidang Riset Pengolahan Produk dan Biotek, sepuluh rekomendasi pada bidang Riset Sosial Ekonomi, dan dua belas rekomendasi pada bidang Riset Kelautan.
12. Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat kelasnya setelah mendapatkan pelatihan dan/atau penyuluhan pada tahun 2019 mencapai 1.903 kelompok. Peningkatan kelas ini terdiri atas peningkatan kelas kelompok Pemula ke Madya sebanyak 1.831 kelompok dan peningkatan kelompok Madya ke Utama sebanyak 72 kelompok.
13. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan selama tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan yaitu dari sebesar Rp137,10 miliar di tahun 2015 menjadi Rp756,51 miliar di tahun 2019. PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan seluruh penerimaan Pemerintah Pusat pada sektor kelautan dan perikanan melalui unit kerja eselon I lingkup KKP yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya,

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP,) Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP), Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), dan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

14. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 mencapai 78,60 dengan kategori BB, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan kategori A, dan KKP meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan tahun 2018.

Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, sampai tahun 2019 telah dilakukan penyusunan kebijakan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna memenuhi aspirasi masyarakat, antara lain:

1. penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Perlindungan dan pemberdayaan tersebut bertujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas, menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan, menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha, melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, dan pencemaran, serta memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum;
2. penerbitan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dalam rangka menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, perubahan lingkungan strategis yang cepat dan dinamis, terutama laju arus perdagangan antarnegara yang melahirkan beberapa ketentuan dan kesepakatan internasional terkait dengan standar keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar, serta pengendalian tumbuhan dan satwa langka;

3. penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Peraturan Pemerintah ini berfungsi sebagai dokumen integrasi kepentingan seluruh K/L untuk pembangunan dan rencana pemanfaatan ruang laut. Rencana tata ruang laut dapat digunakan sebagai alat kendali pemerintah untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan ruang laut karena menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan kelautan nasional, penyusunan perencanaan zonasi untuk kawasan strategis nasional, kawasan strategis nasional tertentu, kawasan antarwilayah, serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan juga sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut.

Beberapa penghargaan yang didapatkan KKP antara lain adalah:

1. KKP sebagai Badan Publik Informatif dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diperoleh dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia;
2. Top 30 Instansi Pemerintah Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tahun 2019 dalam acara "Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
4. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dengan kategori Mentor dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tahun 2018.

Dalam rangka meningkatkan peran KKP sebagai salah satu kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan dan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden, serta untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, KKP telah membangun komunikasi dengan para *stakeholders*, pelaku usaha kelautan dan perikanan, serta para pemangku kepentingan untuk menciptakan iklim usaha sektor kelautan dan perikanan yang semakin kondusif. Selain itu KKP beserta jajarannya terus berupaya mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan dengan menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya dan pertumbuhan ekonomi bidang kelautan dan perikanan.

Berbagai upaya dan kebijakan telah ditempuh sebagai langkah untuk mewujudkan sumber daya kelautan dan perikanan yang berdaulat dan berkelanjutan, serta masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dalam rangka mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

C. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504 pulau, dan yang sudah dibakukan dan didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejumlah 16.671 pulau. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² yang terdiri dari luas laut teritorial 0,29 juta km², luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3,11 juta km², dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia 3,00 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km², dan panjang garis pantai 108.000 km (Badan Informasi Geospasial dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, 2018).

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa Sumber Daya Alam (SDA) terbarukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi), SDA tak terbarukan (minyak, gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nuftah). Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut.

Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI),

berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Dari seluruh potensi sumber daya ikan tersebut, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80% dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 6,98 juta ton pada tahun 2019 atau baru 69,59% dari JTB, sementara total produksi perikanan tangkap (di laut dan perairan darat) adalah 7,53 juta ton. Potensi mikro flora-fauna kelautan juga belum tereksplorasi sebagai penyangga pangan fungsional pada masa depan.

Seiring dengan kegiatan penangkapan ikan, kegiatan budidaya ikan juga selalu meningkat sejak tahun 1980-an, seperti berkembangnya budidaya laut untuk berbagai jenis ikan seperti kerapu, kakap, dan baronang, budidaya tambak untuk komoditas udang dan bandeng, serta budidaya air tawar seperti ikan mas, nila, lele, dan patin.

Indonesia mempunyai potensi lahan perikanan budidaya yang sangat luas yaitu 17,91 juta ha yang meliputi lahan budidaya air tawar 2,8 juta ha (15,8%), lahan budidaya air payau 2,96 juta ha (16,5%) dan lahan budidaya laut 12,12 juta ha (67,7%). Pemanfaatan potensi lahan perikanan baru mencapai 2,7% yang terdiri atas pemanfaatan lahan budidaya laut 278.920 ha, pemanfaatan lahan budidaya tambak 605.909 ha, dan pemanfaatan lahan budidaya air tawar 316.446 ha. Potensi produksi perikanan budidaya di Indonesia mencapai 100 juta ton/tahun dengan nilai produksi mencapai USD 251 miliar (Dahuri, 2019). Kontribusi subsektor perikanan budidaya terhadap total nilai ekspor nonmigas adalah 1,13%, dan 37,71% jika dibandingkan terhadap total nilai ekspor perikanan pada tahun 2018 (BPS, 2019).

Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat mendukung untuk pengembangan pakan ikan mandiri guna mengurangi ketergantungan akan pakan pabrikan yang sangat tergantung kepada bahan baku impor, dalam hal ini tepung ikan. Beberapa bahan tepung pakan yang dapat digunakan sebagai pengganti tepung impor antara lain adalah tepung maggot (ulat lalat hitam/*black soldier*), daging kerang hijau, ikan rucah atau ikan sisa olahan, ikan pemakan

plankton yang nilai ekonominya rendah di masyarakat, bahan fermentasi berbagai tumbuhan, serta cacing *lumbricus*.

Keanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif. Berdasarkan citra satelit, diperkirakan luas terumbu karang Indonesia mencapai 2,5 juta ha (P2O-LIPI, 2018) atau sekitar 10% dari total terumbu karang dunia yaitu seluas 284.300 km² (Spalding *et al.* 2001) dengan penyumbang terbesar adalah *coral triangle* yang menyumbang sekitar 34% (luas 73.000 km²) terhadap total luas terumbu karang dunia (Burke *et al.* 2014). Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga karang dunia yang memiliki kekayaan jenis karang paling tinggi yaitu 569 jenis dari 82 marga dan 15 suku (Suharsono, 2014) atau sekitar 70% lebih jenis karang dunia dan lima jenis diantaranya merupakan jenis yang endemik.

Selanjutnya LIPI melalui Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) menyatakan bahwa penelitian dan pemantauan terumbu karang terhadap 1.067 *site* di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa terumbu karang dalam kategori jelek sebanyak 386 *site* (36,18%), kategori cukup sebanyak 366 *site* (34,3%), kategori baik sebanyak 245 *site* (22,96%), dan kategori sangat baik sebesar 70 *site* (6,56%).

Indonesia juga mempunyai wilayah lamun dan *mangrove* yang luas. Berdasarkan penelitian P2O-LIPI (2018) luasan lamun Indonesia seluas 293.464 ha, sedangkan luas kawasan *mangrove* berdasarkan data *One Map Mangrove* (2018) seluas 3,5 juta ha.

Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya nonhayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam, merupakan subsektor kelautan yang belum tergarap secara optimal.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang diarahkan

untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, sehingga memiliki kapasitas dan kompetensi yang diharapkan untuk optimalnya pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

2. Permasalahan

Sektor kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Tantangan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan saat ini diantaranya adalah:

- a. produktivitas armada penangkapan ikan yang masih belum optimal dan struktur armada penangkapan ikan masih didominasi skala kecil dan tradisional;
- b. kegiatan usaha budidaya ikan di Indonesia masih didominasi oleh pembudidaya skala kecil, teknologi tradisional, produktivitas yang rendah, penurunan daya dukung perairan dan lingkungan, dampak perubahan iklim, nilai tambah yang masih relatif kecil, serta pemanfaatan lahan yang belum optimal, dan biaya produksi yang tinggi;
- c. ketersediaan bahan baku yang tidak stabil untuk mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan;
- d. akses permodalan untuk peningkatan skala usaha;
- e. daya saing dan mutu produk perikanan untuk ekspor yang masih perlu ditingkatkan;
- f. sarana prasarana pendukung di daerah belum seluruhnya memadai seperti pelabuhan perikanan, balai benih, pertambakan garam, budidaya ikan, dan lain lain; serta
- g. degradasi ekosistem, perubahan iklim, dan cuaca ekstrim.

Sedangkan tantangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, antara lain:

- a. pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), termasuk optimalisasi kelembagaan WPPNRI;
- b. harmonisasi ruang laut dan ruang darat untuk penguatan melalui penyelarasan Rencana Tata Ruang (RTR) menurut klasifikasinya dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), dan Rencana Tata Ruang Laut (RTRL);
- c. akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil serta perairan di sekitarnya;
- d. masih terjadinya praktek *IUU fishing* dan *destructive fishing*;
- e. penerapan *good aquaculture practices* masih belum dilaksanakan secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan perikanan budidaya; dan
- f. sinergi *stakeholders* dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Permasalahan pengembangan perikanan tangkap antara lain:

- a. belum optimalnya pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan adanya degradasi Sumber Daya Ikan (SDI) akibat eksploitasi melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi;
- b. tingkat produktivitas kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang masih perlu ditingkatkan;
- c. infrastruktur dan konektivitas pelabuhan perikanan serta sarana dan prasara lainnya yang belum memadai; dan
- d. belum optimalnya akses nelayan terhadap faktor produksi termasuk permodalan serta sistem perlindungan yang harus terus dikembangkan.

Permasalahan pengembangan perikanan budidaya adalah terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul dan bermutu, harga pakan yang masih mahal mengakibatkan biaya produksi tidak efisien, penyakit, kapasitas sumber daya manusia, kondisi infrastruktur yang belum memadai dan terbatas untuk mendukung usaha perikanan budidaya yaitu antara lain balai benih ikan, saluran irigasi, listrik, jalan produksi, laboratorium kesehatan ikan, laboratorium kultur jaringan. Permasalahan lain yang

menghambat pengembangan perikanan budidaya secara berkelanjutan adalah terjadinya asimetrik regulasi yang bersifat intrasektoral dan intersektoral, persyaratan perizinan yang sangat kompleks, kelembagaan pembudi daya ikan masih belum *bankable*, dan keterbatasan akses permodalan.

Permasalahan daya saing industri perikanan nasional untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki masih perlu dioptimalkan untuk menjawab permintaan global yang terus berubah dan semakin ketat. Perluasan investasi asing dan dalam negeri, peningkatan produksi unit pengolahan ikan, penanganan pasca panen yang baik, diversifikasi produk baru sesuai tuntutan pasar, pengembangan sarana dan prasarana, penguatan sistem logistik, dan keberlanjutan usaha perlu terus dilakukan. Selain itu, Pemerintah berupaya untuk menanganani permasalahan permodalan, penurunan hambatan tarif dan non tarif, guna memperkuat pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Disisi lain upaya penguatan sistem karantina ikan serta penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dihadapkan pada permasalahan dengan belum optimalnya penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir (kapal, tambak, *supplier*, dan unit pengolah ikan), masih kurangnya sarana dan prasarana inspeksi dan laboratorium pengujian, sarana layanan dan pengawasan di sentra-sentra produksi, serta di pintu-pintu pos lintas batas negara dan di bandara/pelabuhan baru.

Selain itu, masih terjadi praktik-praktik IUU (*Illegal, Unregulated, Unreported*) *Fishing* di WPPNRI, baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) dan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII). Saat ini, kemampuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas sarana, prasarana, dan kelembagaan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya), peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam skala nasional maupun internasional, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

Selain itu masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan SDKP mengingat kasus pencurian ikan masih marak terjadi di wilayah perairan perbatasan seperti, Laut Natuna sebelah utara, Laut Sulawesi sebelah utara, dan Selat Malaka yang masih terdapat *unresolved area* dengan negara tetangga. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan akan terus menjadi tantangan tersendiri.

Terkait dengan permasalahan garam, selama ini kebutuhan nasional garam dalam negeri banyak dipenuhi dari impor. Sebagai negara yang memiliki panjang pantai nomor dua di dunia, sudah seharusnya kebutuhan nasional garam dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Saat ini produksi garam nasional masih belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri baik secara kuantitas maupun kualitas, yang antara lain dikarenakan usaha pergaraman masih tradisional, infrastruktur yang minim, dan tata niaga garam yang belum mendukung.

Aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, baik yang berada di daratan, wilayah pesisir, maupun laut, tidak dapat terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan iklim yang dapat terjadi di wilayah Indonesia. Bencana alam dan perubahan iklim dapat berdampak serius terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti kenaikan muka air laut yang dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan sebagian wilayah/lahan budidaya di wilayah pesisir, intrusi air laut ke daratan, peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrim (badai, siklon, banjir) yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, serta kerusakan sarana dan prasarana.

Permasalahan lainnya yang masih dihadapi Indonesia adalah masih adanya masyarakat yang kekurangan gizi (*undernutrition*) dan kerdil (*stunting*). Penyelesaian permasalahan ini membutuhkan peran sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam menyediakan sumber pangan bergizi berbasis protein ikan dengan jumlah dan aksesibilitas yang memadai.

D. Lingkungan Strategis

Pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal.

Lingkungan strategis kelautan dan perikanan internal yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan perikanan, yaitu:

1. aspek ekonomi yang berfokus pada upaya peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB dan pendapatan, serta penyerapan tenaga kerja;
2. aspek sosial dan politik yang berkaitan dengan konstelasi politik di tingkat nasional maupun daerah serta pembagian wewenang urusan perikanan dengan pemerintah daerah dalam koridor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. kerangka kebijakan dan hukum nasional terkait dengan peningkatan keterlibatan *stakeholders* dalam penyusunan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan dan terkait ratifikasi berbagai konvensi internasional, pelaksanaan Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, dan berbagai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berkaitan dengan bidang kelautan dan perikanan;
4. sistem kelembagaan dan pemerintahan di pusat dan daerah terutama menyangkut sinergi dan dukungan lintas K/L terkait serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten dan/atau Kota;
5. perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Teknologi Informasi terutama terkait dengan penyediaan data statistik perikanan yang handal sangat diperlukan sebagai data dasar untuk mengukur tingkat eksploitasi dan status stok ikan di satu WPPNRI yang berguna untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya ikan dan pertumbuhan ekonomi;
6. kapasitas sumber daya manusia terutama berkaitan dengan pendayagunaan peran strategis sumber daya manusia perikanan sebagai penentu keberhasilan kegiatan di sentra-sentra kelautan dan perikanan; dan
7. sistem pengawasan terutama terkait dengan jaminan ketertiban pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan demi terjaganya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pada konteks pembangunan kelautan dan perikanan, lingkungan strategis eksternal yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yakni: *United Nations Convention*

on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, *United Nations Fish Stocks Agreement* (UNFSA) 1995, *FAO Compliance* 1993, *Port State Measures Agreement* 2009, *Code of Conduct for Responsible Fisheries* dan *International Plan of Action, Sustainable Development Goals (SDGs)* kelautan dan perikanan, dan *The United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada tahun 1994. Terdapat juga organisasi pengelolaan perikanan regional atau *Regional Fisheries Management Organisations* (RFMOs) yang melingkupi perairan Indonesia seperti *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC), *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT), dan *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC). Selain itu, terdapat pula berbagai Pakta Internasional dan Regional, seperti *World Trade Organization* (WTO), dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), Konvensi dan kerja sama *Convention on Biological Diversity* (CBD), *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), *International Coral Reef Initiative* (ICRI) dan *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security* (CTI-CFF). Sebagai bagian dari entitas pada hukum dan perjanjian internasional tersebut, maka Indonesia harus mampu mengoptimalkan keterlibatannya.

Beberapa faktor strategis lingkungan internal yang menjadi kekuatan, antara lain:

1. sumber daya ikan, habitat, dan produksi;
2. pengelolaan perikanan nasional berbasis WPPNRI;
3. komunikasi dengan *stakeholders* kelautan dan perikanan;
4. penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan;
5. ketersediaan bahan baku untuk industri perikanan;
6. permintaan hasil perikanan dalam negeri; dan
7. pengelolaan sistem pembinaan mutu dan keamanan pangan.

Sedangkan yang menjadi kelemahan, antara lain:

1. ekonomi nasional;
2. sosial budaya nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang, antara lain:

1. permintaan hasil perikanan dunia;
2. sumber daya alam dan tingkat produksi perikanan dunia;

3. kerja sama bilateral, regional, multilateral, serta instrumen internasional (termasuk RFMOs);
4. kependudukan dunia.

Sedangkan yang menjadi ancaman, antara lain:

1. globalisasi perdagangan dan pasar bebas hasil perikanan regional serta dunia;
2. praktik *IUU Fishing*;
3. ketentuan *World Trade Organisation* (WTO); dan
4. pengaruh atas dikeluarkannya status Indonesia sebagai negara berkembang oleh Amerika Serikat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

B. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

C. Tujuan

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi:

1. “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan:
 - a. meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
 - b. menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
2. “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”, dengan tujuan:
 - a. optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - b. meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;

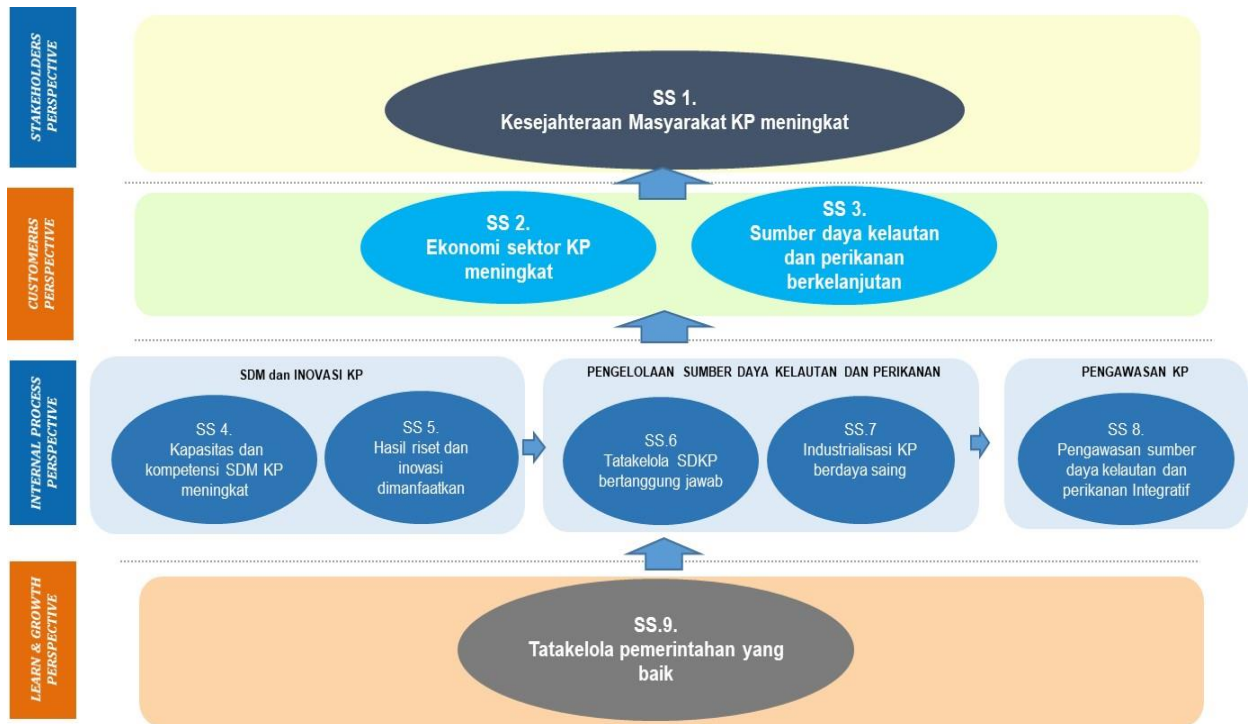
- c. meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. meningkatnya sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
 - e. optimalnya pengelolaan ruang laut.
3. “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.
 4. “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”, dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2020-2024, terdiri dari:

- SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;
- SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan;
- SS-6 Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab;
- SS-7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing;
- SS-8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif;
- SS-9 Tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penyusunan Peta Strategi, KKP menggunakan empat perspektif yaitu *stakeholders prespective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, dengan Peta Strategi sebagai berikut:



Stakeholders Perspective

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat”, dengan Indikator Kinerja, yaitu Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024.

Customer Perspective

Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat”, dengan indikator kinerja:

- 1) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7,9% pada tahun 2020 menjadi 8,71% pada tahun 2024;
- 2) nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 8,00 miliar pada tahun 2024; dan
- 3) konsumsi ikan, dari 56,39 kg/kapita/tahun pada tahun 2020 menjadi 62,05 kg/kapita/tahun pada tahun 2024.

Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan”, dengan indikator kinerja:

- 1) proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman dari $\leq 64\%$ pada tahun 2020 menjadi $\leq 80\%$ pada tahun 2024; dan
- 2) luas kawasan konservasi perairan, dari 23,40 juta ha pada tahun 2020 menjadi 26,90 juta ha pada tahun 2024.

Internal Process Perspective

Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat”, dengan indikator kinerja:

- 1) persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dari 60 % pada tahun 2020 menjadi 75 % pada tahun 2024; dan
- 2) kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya, setiap tahun minimal sebanyak 1.500 kelompok per tahun selama tahun 2020-2024.

Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan”, dengan indikator kinerja, yaitu hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan, dari 5 (lima) hasil riset pada tahun 2020 menjadi 15 (lima belas) hasil riset pada tahun 2024.

Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab”, dengan indikator kinerja:

- 1) WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola, dari tiga WPPNRI pada tahun 2020 menjadi sebelas WPPNRI pada tahun 2024;
- 2) penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir, dari 24 Rencana Zonasi pada tahun 2020 menjadi dua belas Rencana Zonasi pada tahun 2024 (102 kumulatif Rencana Zonasi tahun 2020-2024); dan
- 3) persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan, dari 94% pada tahun 2020 menjadi 98% pada tahun 2024.

Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah “Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing”, dengan indikator kinerja:

- 1) produksi perikanan, dari 26,46 juta ton (produksi ikan 15,47 juta ton dan rumput laut 10,99 juta ton) pada tahun 2020 menjadi 32,75 juta ton (produksi ikan 20,42 juta ton dan rumput laut 12,33 juta ton) pada tahun 2024;
- 2) produksi garam nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024;
- 3) dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil, dari Rp2,8 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,2 triliun pada tahun 2024;

- 4) kawasan kluster sentra produksi perikanan budidaya unggulan, dari lima kawasan pada tahun 2020 menjadi lima puluh kawasan pada tahun 2024.

Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yang akan dicapai adalah “Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif”, dengan indikator kinerja:

- 1) persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing*, dari 54% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024;
- 2) persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan 93% dari tahun 2020 hingga tahun 2024; dan
- 3) tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan dari 77% pada tahun 2020 menjadi 82% pada tahun 2024.

Learning and Growth Perspective (input)

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* KKP melalui Sasaran strategis kesembilan (SS-9) “Tatakelola pemerintahan yang baik” dengan indikator kinerja:

- 1) nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari 71 pada tahun 2020 menjadi 75 pada tahun 2024; dan
- 2) nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memuat tentang Visi, Misi, Arahan Presiden yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti pada gambar di bawah ini.



Dalam rangka melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024, telah disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. *Major Project* dimana KKP sebagai salah satu pelaksana utama yaitu revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng, integrasi pelabuhan perikanan dan pasar ikan bertaraf

internasional, dan penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan sebagaimana tabel di bawah ini.

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
6	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 Juta ton) Meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun 	<p>25</p> <ul style="list-style-type: none"> APBN: 3,3 Swasta: 21,7 	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemendag, KemenKUKM, KemenESDM, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
7	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton pada tahun 2024 Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,0 miliar pada tahun 2024 	<p>30</p> <ul style="list-style-type: none"> APBN: 7,2 KPBU dan Swasta: 22,8 	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
4	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10% per tahun (target SDGs) Meningkatnya produktivitas komoditas 5% per tahun. 	<p>226,4</p> <ul style="list-style-type: none"> APBN: 200,9 Swasta: 25,5 	a.l Kementan, KemenKP, KemenKUKM, Kemenperin, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

Selain itu KKP juga mendukung *Major Project* lainnya antara lain pengembangan sepuluh destinasi pariwisata prioritas. Dalam pelaksanaannya, *Major Project* dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan, serta direktif Presiden.

Pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) dilakukan bersinergi antara KKP dengan K/L dan instansi lain yang terkait serta dengan pemerintah daerah dan badan usaha (BUMN/Swasta).

Strategi Agenda Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas KKP, antara lain:

- memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, yang meliputi peningkatan pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, memperkuat komitmen pelaksanaan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-14 yakni Ekosistem Lautan (*Life Below Water*), dan peningkatan nilai tambah,

lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, industrialisasi, dan penguatan riset dan inovasi;

2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan strategi penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan/Strategis Nasional Tertentu (PKSN/T), sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau budidaya (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Pada tahun 2020 terdapat tiga belas SKPT yaitu SKPT Natuna, SKPT Sebatik, SKPT Merauke, SKPT Saumlaki, SKPT Sabang, SKPT Sumba Timur, SKPT Rote Ndao, SKPT Mentawai, SKPT Morotai, SKPT Talaud, SKPT Moa, SKPT Biak, dan SKPT Timika;
3. meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang meliputi pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi bidang kelautan dan perikanan serta percepatan perbaikan gizi masyarakat melalui Gemarikan;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan melalui perlindungan dan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan strategi konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati di daratan maupun pesisir, perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan, dan pengembangan rendah karbon pesisir dan laut; dan
6. memperkuat stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Kemanan dan transformasi pelayanan publik melalui penguatan keamanan laut, pembangunan dan operasional armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pembangunan kelautan dan perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju, serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang terjaga. Pencapaian peran tersebut dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan prioritas nasional sebagaimana tersebut di atas.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan Presiden yang terkait dengan sektor kelautan dan dan perikanan. Arah dan kebijakan KKP yang akan ditempuh dalam tahun 2020-2024, terdiri dari:

1. memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;
2. mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat;
3. membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
4. pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait; dan
5. penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan lima arah kebijakan tersebut, KKP menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Disamping itu, KKP melaksanakan seluruh kebijakan pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024, yakni gender, pembangunan berkelanjutan, modal sosial, dan transformasi digital.

Strategi pelaksanaan arah kebijakan, terdiri dari:

1. arah kebijakan “Memperbaiki komunikasi dengan nelayan evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan” dilaksanakan dengan strategi, antara lain:
 - a. membuka komunikasi dengan *stakeholders* untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi, dan pengetahuan yang faktual;

- b. optimalisasi pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI, termasuk optimalisasi kelembagaannya, baik WPPNRI di laut maupun perairan darat;
- c. penguatan penyediaan dan pemanfaatan data stok sumber daya ikan sebagai basis pengelolaan sumber daya ikan yang maju dan berkelanjutan;
- d. perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait;
- e. pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (*eco fishing port*), dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (*Major Project RPJMN 2020-2024*), dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan badan usaha;
- f. eksplorasi perikanan di ZEEI dan laut lepas;
- g. fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, serta optimalisasi peran BLU-LPMUKP/Bank Nelayan;
- h. peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan termasuk kelompok nelayan perempuan, diversifikasi usaha nelayan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi hak atas tanah nelayan, dan perlindungan HAM Perikanan;
- i. penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi nelayan (*Major Project RPJMN 2020-2024*), berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, BUMN, pemerintah daerah, dan swasta;
- j. pengelolaan perikanan di perairan umum;
- k. pengembangan armada perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- l. partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan indonesia (RFMOs);
- m. pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumber daya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital;

- n. pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT); dan
 - o. penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap.
2. arah kebijakan “Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat melalui pengembangan industrialisasi perikanan budidaya yang berkelanjutan didukung dengan modernisasi teknologi dan manajemen usaha yang efisien, kemudahan akses permodalan dan perizinan usaha, infrastruktur yang memadai, sarana input produksi yang bermutu, perlindungan usaha budidaya, dan sinergisitas program dengan lintas sektor” dilaksanakan dengan strategi, antara lain:
- a. akselerasi peningkatan produksi *aquaculture*/perikanan budidaya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan budidaya;
 - b. pembangunan/revitalisasi tambak udang dan bandeng (*Major Project* RPJMN 2020-2024), berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan badan usaha/swasta;
 - c. pengembangan komoditas perikanan budidaya yang memiliki nilai ekonomis penting di semua tipologi ekosistem yaitu laut, payau, dan tawar untuk pemenuhan konsumsi domestik, sumber devisa negara dan keberlanjutan lingkungan. Komoditas utama antara lain udang, nila, lele/patin, bandeng, dan rumput laut;
 - d. pengembangan pakan ikan mandiri yang terdiri dari pakan buatan dan pakan alami;
 - e. pengembangan sistem perbenihan ikan nasional melalui penguatan jejaring atau sistem logistik perbenihan nasional, pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana balai benih ikan, unit perbenihan ikan di masyarakat, dan *broodstock center*, serta modernisasi teknologi;
 - f. pengembangan kawasan kluster usaha budidaya ikan yang berkelanjutan termasuk di kawasan minapolitan dan SKPT didukung dengan manajemen pengelolaan yang terintegrasi dan modern;
 - g. pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan kawasan perikanan budidaya yang dilakukan antara lain melalui *surveillance* hama dan penyakit ikan, pengujian residu produk perikanan budidaya, modernisasi sarana laboratorium, dan pembangunan pusat kesehatan ikan terpadu;

- h. pengembangan dan pelaksanaan sertifikasi perikanan budidaya di bidang pembesaran, pembenihan, dan pakan;
 - i. pembangunan dan penguatan infrastruktur perikanan budidaya air payau, air tawar, dan air laut antara lain meliputi tambak, kolam, saluran irigasi tambak, jalan produksi, instalasi listrik, dan keramba jaring apung;
 - j. peningkatan kerja sama dan sinergisitas kebijakan, program, anggaran, dan data perikanan budidaya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta lintas sektoral di tingkat nasional maupun internasional;
 - k. penguatan kelembagaan dan pemberdayaan pembudi daya ikan melalui pemberian stimulus usaha, fasilitasi skema pembiayaan yang murah dan mudah, sertifikasi lahan, asuransi usaha perikanan budidaya, serta pendampingan teknis;
 - l. pengaturan akses perizinan dan investasi usaha perikanan budidaya yang mudah dan murah bagi pelaku usaha serta didukung dengan regulasi yang kondusif;
 - m. pengembangan SKPT; dan
 - n. penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan budidaya.
3. arah kebijakan “Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan” dilaksanakan dengan strategi, antara lain:
- a. peningkatan kualitas, kapasitas, dan produktivitas industri pengolahan ikan/udang, dan rumput laut;
 - b. peningkatan standardisasi, ketelusuran (*traceability*), jaminan mutu, dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
 - c. penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik, penguatan sistem logistik ikan yang efisien, pemetaan, dan pemantauan logistik hasil perikanan;
 - d. pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan dan penguatan daya saing Unit Pengolahan Ikan (UPI);
 - e. pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan;
 - f. peningkatan sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan;

- g. pelaksanaan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat dalam rangka mengatasi *stunting*;
- h. perluasan akses pasar dalam dan luar negeri, pengembangan sistem pemasaran produk berbasis digital, peningkatan promosi produk kelautan dan perikanan untuk skala internasional, penguatan *branding* produk kelautan dan perikanan Indonesia, pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor;
- i. pembinaan dan pengelolaan pasar ikan, pengembangan kawasan pengolahan, pembangunan fasilitas pemasaran perikanan skala internasional (*Major Project* RPJMN 2020-2024) dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan badan usaha;
- j. pemetaan preferensi, konsumsi, dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri;
- k. peningkatan partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan dan optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG);
- l. penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil kelautan dan perikanan, Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP), sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan;
- m. peningkatan unit penanganan dan unit pengolahan produk hasil kelautan dan perikanan;
- n. pemenuhan kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju *zero waste*;
- o. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penanganan pasca panen, dan peralatan pengolahan;
- p. peningkatan ragam baru (diversifikasi) produk hasil kelautan dan perikanan, hilirisasi industri rumput laut, dan sumber daya alam laut bernilai tambah;
- q. fasilitasi kemudahan pelaku usaha untuk berinvestasi, mengakses pembiayaan, teknologi dan pasar, serta didukung regulasi yang kondusif;
- r. pelaksanaan uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- s. penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui pengembangan kawasan usaha;

- t. harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan, penerapan standardisasi mutu, sertifikasi, dan ketelusuran produk (*traceability*);
 - u. pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi;
 - v. penguatan laboratorium acuan penyakit ikan karantina dan mutu hasil perikanan, serta jejaring laboratorium keamanan pangan hasil perikanan;
 - w. peningkatan layanan sertifikasi ekspor/impor/domestik berbasis elektronik, penyederhanaan layanan, serta pengembangan inovasi pelayanan publik;
 - x. pengembangan SKPT; dan
 - y. penguatan Unit Pelaksana Teknis mutu hasil perikanan dan peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
4. arah kebijakan “Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
- a. peningkatan pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan melalui upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon pesisir dan laut;
 - b. perbaikan dan peningkatan kualitas ekosistem pesisir yang rusak melalui kegiatan rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. penanganan pencemaran laut dan sampah plastik;
 - d. peningkatan manajemen dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan, rehabilitasi *mangrove*, dan terumbu karang;
 - e. peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan;
 - f. penguatan jejaring, kemitraan/kerja sama, dan peran KKP dalam konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut;
 - g. peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar;
 - h. peningkatan produktivitas dan kualitas garam nasional disertai dengan pengelolaan garam dari hulu ke hilir di sentra ekonomi garam;

- i. pengelolaan kawasan wisata bahari dan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);
- j. peningkatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi;
- k. pengakuan dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil;
- l. pemanfaatan air laut, pengelolaan biofarmakologi, dan peningkatan pemanfaatan *marine bioproduct* dan bioteknologi;
- m. penguatan sistem perizinan pemanfaatan ruang laut;
- n. penyelesaian perencanaan ruang laut meliputi rencana zonasi kawasan laut, rencana zonasi wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, rencana aksi dan peninjauan kembali, serta penyelarasannya dengan rencana tata ruang;
- o. akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil serta perairan di sekitarnya antara lain melalui pelaksanaan perizinan lokasi perairan dan penyelenggaraan kadaster laut;
- p. peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana, dan kelembagaan pengawasan SDKP;
- q. operasional armada pengawasan SDKP;
- r. penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya);
- s. peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP;
- t. pengembangan SDM aparatur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
- u. peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- v. operasional pengawasan ekspor, impor, dan domestik;
- w. harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan dalam dan luar negeri, sinergi pengawasan lalu lintas ikan, penguatan pengawasan karantina ikan di lintas batas negara (darat/laut), dan bandara/pelabuhan;
- x. penguatan operasional pengawasan dan penindakan pelanggaran dibidang karantina ikan dan keamanan hayati ikan;
- y. peningkatan sarana dan prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, karantina ikan, dan laboratorium uji (*reference* dan *destructive fishing*);
- z. pengembangan SKPT; dan

- aa. peningkatan Unit Pelaksana Teknis pengelolaan ruang laut, Unit Pelaksana Teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan Unit Pelaksana Teknis karantina ikan.
5. arah kebijakan “Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
- a. peningkatan riset untuk menyediakan data dan/atau informasi stok sumber daya perikanan (*stock assessment*) di WPPNRI dan Perairan Umum Daratan (PUD);
 - b. peningkatan hilirisasi dan komersialisasi hasil riset dan Hak Kekayaan Intelektual (KHI)/paten dengan pemerintah daerah, UKM, dan dunia usaha dan industri;
 - c. peningkatan dukungan riset dan teknologi dalam pengambilan kebijakan *science based policy* untuk menjawab isu dan masalah sektor kelautan dan perikanan;
 - d. peningkatan hasil riset dan inovasi teknologi yang mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan, serta peningkatan adopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas kelautan dan perikanan;
 - e. pengembangan pusat unggulan riset sehingga menjadi *center of excellence* dalam riset dan inovasi teknologi kelautan dan perikanan;
 - f. pengembangan kurikulum pendidikan vokasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan *teaching factory* dan memperkuat *link and match* berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri, serta menumbuhkan wirausaha baru di bidang kelautan dan perikanan;
 - g. pengembangan sistem pelatihan berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan standar internasional melalui penerapan Konvensi STCW-F 1995;
 - h. pengembangan sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri berkerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi bidang kelautan dan perikanan;
 - i. perluasan jangkauan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang berbasis digital (*e-learning, e-training, e-extension*);
 - j. pengembangan kelembagaan pendidikan vokasi, pelatihan, dan riset kelautan dan perikanan;
 - k. penguatan sistem penyuluhan berbasis hasil riset *Research Extension Linked* (REL) untuk mendukung program kementerian

dan kebijakan peningkatan produktivitas kelautan dan perikanan, serta penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan;

- l. peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan sesuai standar nasional dan internasional, termasuk peningkatan kapasitas tenaga peneliti, pendidik, pelatih, dan penyuluh;
- m. peningkatan kerja sama dan sinergitas riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dengan lembaga nasional dan internasional;
- n. peningkatan kapasitas UPT riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan kelima arah kebijakan KKP tersebut perlu didukung penguatan penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Strategi yang akan dilaksanakan adalah peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas laporan Keuangan KKP, peningkatan kualitas pelaksanaan SAKIP KKP, serta penguatan pembangunan budaya integritas dan pengawasan internal.

Implementasi hal di atas dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat, dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial, dan budaya bagi kepentingan bersama.

Arah kebijakan dan strategi tersebut disusun juga dalam rangka meningkatkan penerimaan PNBP sektor kelautan dan perikanan yang bersumber dari PNBP Sumber Daya Alam (SDA), Non-SDA dan Badan Layanan Umum (BLU) KKP. Peningkatan penerimaan PNBP pada periode tahun 2015-2019 diharapkan terus berlanjut pada periode tahun 2020-2024. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin besarnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan nasional.

Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, meliputi:

1. tujuan pembangunan berkelanjutan;
2. gender;
3. modal sosial budaya; dan

4. transformasi digital.

Pengarusutamaan dalam Renstra 2020-2024 KKP tersebut mengacu pada RPJMN 2020-2024 sebagai bentuk pembangunan inovatif adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara *inklusif*. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

TPB/SDGs mencakup 17 tujuan/*goal*, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB nomor 14, yakni Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya:

- a. mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut;
- b. meningkatkan kapasitas/pengetahuan masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- c. mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan;
- d. meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut;
- e. mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan;
- f. melestarikan wilayah pesisir dan laut;
- g. mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih;
- h. meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air, dan pariwisata berkelanjutan;

- i. meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian, dan alih teknologi kelautan;
- j. menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan
- k. meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya melalui penegakan hukum internasional yang tercermin dalam *The United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).

KKP juga mendukung pencapaian target TPB nomor 2, yaitu Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*), dan TPB nomor 13, yaitu Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*).

2. Gender

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dimana Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. KKP telah melaksanakan PUG yang diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di sektor kelautan dan perikanan dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol, dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan PUG di sektor kelautan dan perikanan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup:

- a. penguatan tujuh prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG), yakni: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat;
- b. penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- c. penyiapan *roadmap* PUG;
- d. pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antarunit kerja eselon I di KKP dan antara pusat dan daerah;
- e. pembuatan profil gender; dan
- f. monitoring dan evaluasi serta pengawasan PUG KKP.

KKP terus mengupayakan keadilan dan kesetaraan gender bagi masyarakat kelautan dan perikanan dengan arah kebijakan PUG. PUG diharapkan mempengaruhi sasaran strategis, seperti kebijakan pembangunan yang efisien, tata kelola sumber daya kelautan dan

perikanan yang adil, serta pengendalian dan pengawasan sumber daya yang partisipatif.

Beberapa program dan kegiatan responsif gender diantaranya adalah bimbingan teknis dan bantuan pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan nelayan, bantuan sarana produksi peralatan pengolahan produk kelautan dan perikanan, penguatan kapasitas kelompok dalam pengelolaan usaha garam rebus, bantuan paket usaha perikanan budidaya, alih teknologi hasil riset pengolahan, dan pemanfaatan hasil perikanan.

3. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, diantaranya:

- a. pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal, dan keragaman SDA hayati;
- b. pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari; dan
- c. fasilitasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*.

Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan *one data* penerapan SPBE KKP, termasuk penataan sistem perizinan berbasis web (*on-line*), serta peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

C. Kerangka Regulasi

Dalam rangka percepatan implementasi arahan Presiden untuk penataan regulasi yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional dan penguatan ekonomi, serta menindaklanjuti masukan, aspirasi, dan saran dari pemangku kepentingan kelautan dan perikanan, KKP telah menerbitkan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.717/MEN-KP/XI/2019 tentang Kajian Terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. *Omnibus law* merupakan sebuah metode atau teknik yang digunakan untuk mengganti/mencabut undang-undang atau beberapa ketentuan dalam undang-undang yang diatur ulang dalam satu undang-undang (tematik).

Adapun tujuan dari *omnibus law* meliputi:

1. mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara efektif dan efisien;
2. pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien, dan efektif;
3. meningkatkan hubungan koordinasi antarinstansi terkait;
4. menyeragamkan kebijakan pemerintah di pusat dan daerah untuk menunjang iklim investasi;
5. mampu memutus rantai birokrasi yang lama; dan
6. menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

Ada empat peraturan perundang-undangan sektor kelautan dan perikanan yang masuk dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; dan
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Penyusunan peraturan perundang-undangan di KKP dilaksanakan berdasarkan program penyusunan peraturan perundang-undangan tahunan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, selain itu penyusunan peraturan didasarkan pada kebutuhan strategis KKP dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang transparan, akuntabel, dan implementatif, maka diperlukan masukan dari masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan uji publik atau konsultasi yang dalam hal ini dilakukan KKP dengan melibatkan para pakar yang tergabung dalam Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, maka dalam hal:

1. kebijakan berpotensi pada aspek perekonomian dan aspek penciptaan lapangan kerja, maka Menteri menyampaikan kebijakan tersebut kepada Menteri Koordinator untuk mendapatkan pertimbangan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan;
2. kebijakan berpotensi pada disharmonisasi kewenangan dan berpotensi pada tidak terlaksananya tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, maka menteri menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut untuk dibahas dalam Rapat Koordinasi guna mendapatkan kesepakatan; dan
3. kebijakan berpotensi pada stabilitas nasional, maka menteri menyampaikan rencana kebijakan tersebut secara tertulis kepada

Presiden melalui Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapatkan keputusan.

Secara terinci rencana kerangka regulasi tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

D. Kerangka Kelembagaan

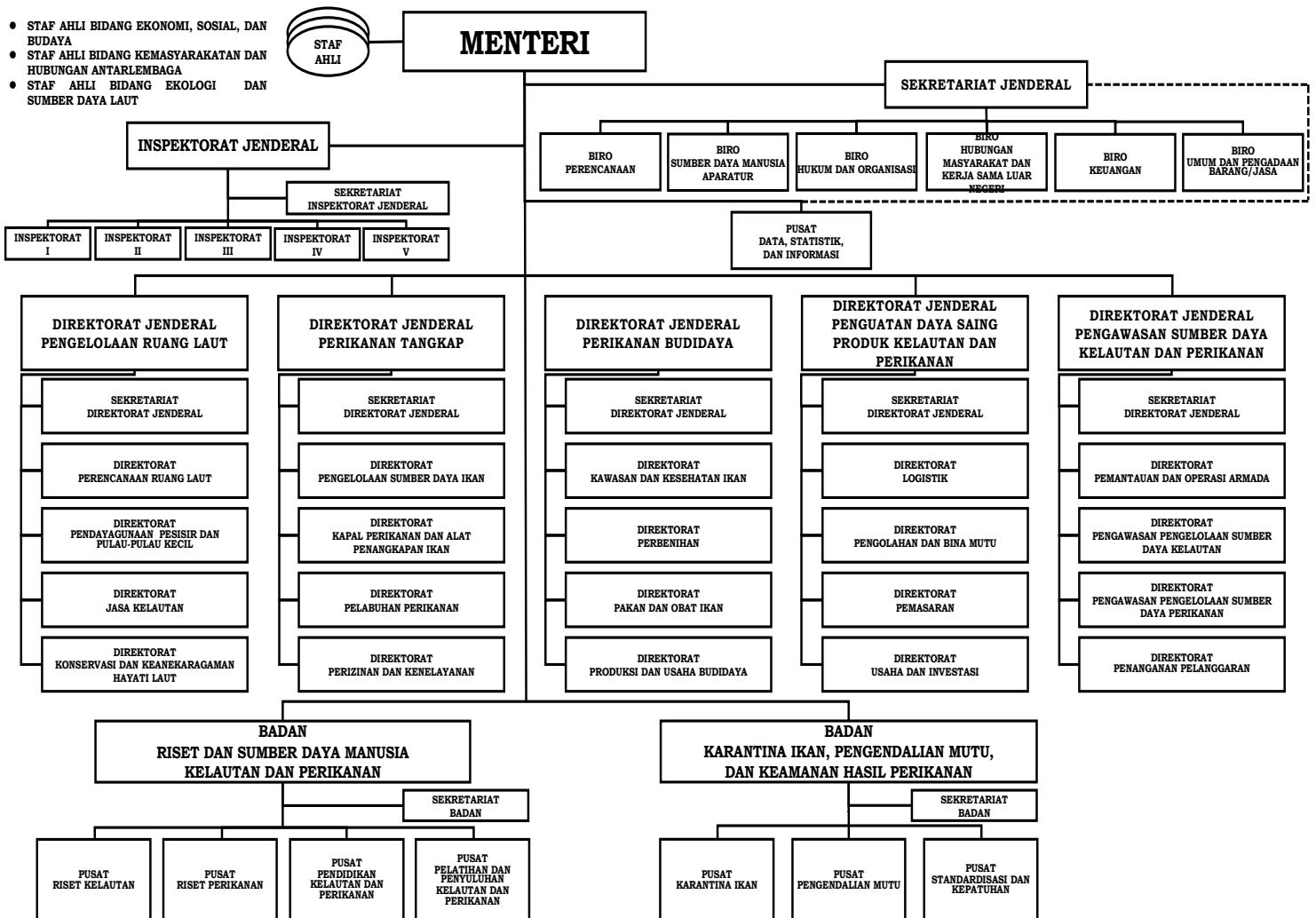
Kerangka kelembagaan merupakan perangkat K/L (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi;
2. kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta ketentuan peraturan perundangan-undangan;
3. prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan; dan
4. tata laksana dan sumber daya manusia aparatur.

Kerangka kelembagaan dalam perencanaan strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat *intern* maupun antarorganisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Kelembagaan yang dikembangkan harus tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses yang menekankan nilai *structure follow strategy*, dan diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan, diantaranya adalah mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017, KKP telah melakukan penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018, sebagaimana berikut:



Penataan kelembagaan KKP akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang, serta arahan Presiden terkait dengan transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional. Disamping itu akan dilakukan penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis KKP di daerah.

Penataan kelembagaan KKP selanjutnya akan diikuti dengan penyesuaian dan *redesign* nomenklatur program dan kegiatan. Disamping itu, akan diikuti dengan penguatan kapasitas SDM, terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di KKP.

BAB IV
INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja Utama 2020-2024

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE						
SS 1. Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan meningkat						
1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	59,16	60,31	61,47	62,66	63,87
	a. Nilai Tukar Nelayan	102,00	103,00	105,00	106,00	107,00
	b. Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00
	c. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan	103,75	104,00	104,25	104,50	104,75
	d. Nilai Tukar Petambak Garam	102,75	103,00	103,25	103,50	103,75
CUSTOMERS PERSPECTIVE						
SS 2. Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan meningkat						
2	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7,90	8,11	8,31	8,51	8,71
3	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	6,17	6,63	7,13	7,66	8,00
4	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	56,39	58,08	59,53P	61,02	62,05
SS 3. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan						
5	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman pada tahun 2024 (%)	≤64%	≤67%	≤72%	≤76%	≤80%
6	Luas kawasan konservasi perairan (juta ha)	23,4	24,2	25,1	26,0	26,9
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
SS 4. Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat						
7	Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) (%)	60	62	65	70	75
SS 5. Hasil Riset dan Inovasi dimanfaatkan						
8	Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan (hasil riset)	5	8	11	13	15
SS 6. Tatakelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab						
9	WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPPNRI)	3	5	7	9	11

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024
10	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Rencana Zonasi)	14	24	26	26	12 (102 Kumulatif)
11	Persentase Kepatuhan (<i>compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	94	95	96	97	98
SS 7. Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing						
12	Produksi perikanan (juta ton)	26,46	27,89	29,42	31,01	32,75
	a. Perikanan Tangkap	8,02	8,42	8,88	9,43	10,10
	b. Perikanan Budidaya	18,44	19,47	20,54	21,58	22,65
	- Ikan	7,45	7,92	8,69	9,48	10,32
	- Rumpul Laut	10,99	11,55	11,85	12,10	12,33
13	Produksi garam (juta ton)	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
SS 8. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan <i>integrative</i>						
14	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	54	60	65	70	75
15	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)	93	93	93	93	93
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
SS 9. Tatakelola Pemerintahan yang baik						
16	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP	71	72	73	74	75
17	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA (%)	88	89	89	90	90

B. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan beberapa unit organisasi K/L setingkat eselon I.

Sebagai salah satu wujud efektivitas dan efisiensi pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas bersama-sama dengan Kementerian Keuangan telah menyusun restrukturisasi program dan penganggaran K/L dengan tujuan:

1. memastikan fungsi seluruh elemen pemerintahan tercermin dan terbagi habis di seluruh program K/L;

2. memastikan pelaksanaan seluruh Prioritas Nasional dan *Major Project* terakomodasi dalam program-kegiatan-*output* K/L;
3. memastikan satu *output* dihasilkan tidak lebih dari satu K/L; dan
4. memastikan konvergensi pencapaian sasaran dalam program lintas (baik program lintas unit kerja eselon I dalam satu K/L, maupun program lintas K/L).

Pendekatan program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit kerja eselon I, namun lebih mencerminkan tugas fungsi K/L. Program dapat bersifat lintas unit kerja eselon I dalam satu K/L atau bersifat lintas K/L. Perumusan program baik yang bersifat lintas unit kerja eselon I atau lintas K/L dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dengan berkoordinasi dengan K/L terkait.

C. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di KKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat eselon II.

D. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN, APBD, dan DAK), swasta, perbankan dan nonperbankan, dan masyarakat serta dunia usaha. Pendanaan APBN KKP akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan. Adapun penguatan sinergi pendanaan antara KKP, K/L terkait serta APBD terus diintensifkan. Pendanaan juga diharapkan dapat dilakukan melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) serta kredit yang disalurkan melalui perbankan. Selain itu juga diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (*innovative financing*) antara lain seperti Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), kerja sama Pemerintah dan

Badan Usaha (KPBU), *Blended Finance*, *Green Finance*, serta *Output Based Transfer/Hibah* ke daerah.

Kerangka indikasi pendanaan KKP tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp42,6 triliun yang terdiri dari kegiatan operasional Rp15,6 triliun dan nonoperasional Rp27,0 triliun. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Indikator kinerja dan indikasi pendanaan KKP 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, dan belum memperhitungkan dampak pandemi global Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020.

BAB V PENUTUP

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, maka Rencana Strategis KKP tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Rencana Strategis KKP tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Renja KKP dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, dan akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra KKP tahun 2020-2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan juga dihasilkan berkat adanya dukungan *stakeholders* dan dukungan sektor terkait lainnya serta masyarakat luas. Kerja keras dari seluruh jajaran KKP dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

MATRIK KERANGKA REGULASI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

A. Rancangan Undang-Undang

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Undang-Undang tentang Landas Kontinen	Menyempurnakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian ESDM	2021	<ul style="list-style-type: none"> - Inisiatif Pemerintah - Materi muatan menyesuaikan dengan UNCLOS 1982
2.	Undang-Undang tentang Perikanan	Menyempurnakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2020	Inisiatif DPR
3.	Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Menyempurnakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,	2024	Inisiatif Pemerintah

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
				Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
4.	Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	Menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan	2024	Inisiatif Pemerintah

B. Rancangan Peraturan Pemerintah

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina	Mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertanian, dan Kementerian	2024	Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut akan dirangkum dalam 1

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
	Hewan, Ikan, dan Tumbuhan			Lingkungan Hidup dan Kehutanan		(satu) Peraturan Pemerintah
2.	Peraturan Pemerintah Tentang Kapal Perikanan	Mandat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Perhubungan	2021	
3.	Peraturan Pemerintah Tentang Pengawasan Perikanan	Mandat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, TNI-AL, dan POLRI	2022	

C. Rancangan Peraturan Presiden

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional dan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.	2020-2024	

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
2.	Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan <i>Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing</i> (IUU Fishing)	Rekomendasi dari <i>International Plan of Action IUU Fishing</i> , dan Rencana Aksi ini dalam pelaksanaannya melibatkan K/L terkait	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, TNI AL, POLRI, Badan Keamanan Laut, dan Kejaksaan Agung	2024	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	a. WPPNRI yang menjadi model percontohan pengutan tata kelola	3	5	7	9	11						
	b. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Rencana Zonasi/RZ)	14	24	26	26	12 (102 Kumulatif)						
	c. Persentase Kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan	94	95	96	97	98						
SS 7	Industrialisasi KP berdaya saing											
	a. Produksi perikanan (juta ton)	26,46	27,89	29,42	31,01	32,75						
	b. Produksi garam (juta ton)	3	3,1	3,2	3,3	3,4						
SS 8	Pengawasan SD kelautan dan perikanan integratif											
	a. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	54	60	65	70	75						
	b. Persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan (%)	93	93	93	93	93						
SS 9	Tatakelola pemerintahan yang baik											
	a. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP	71	72	73	74	75						
	b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP	88	89	89	90	90						
Program Dukungan Manajemen							3.210,2	3.440,9	3.760,1	4.054,2	4.333,8	18.799,2
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup KKP dan Sekretariat Jenderal											
	a. Nilai PMPRB Setjen (Nilai)	30	31	32	33	34						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	b. Nilai SAKIP KKP (Nilai)	A (82,5)	A (83)	A (83,5)	A (84)	A (85)						
	c. Nilai PM SAKIP SETJEN (Nilai)	83	83,15	83,25	83,5	83,75						
	d. Nilai SPBE KKP (Nilai)	3,6	3,7	3,8	3,9	4						
	e. Opini BPK atas LK KKP (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	f. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK SETJEN dibandingkan Realisasi Anggaran SETJEN (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	g. Level Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal (level)	3	3	3	3	3						
	h. Indeks Kematangan UKPBJ KKP (Indeks)	7	9	9	9	9						
	i. Nilai pengawasan kearsipan lingkup KKP (nilai)	83	83,5	84	84,5	85						
	j. Indeks Sistem Merit KKP (Indeks)	0,65	0,7	0,8	0,83	0,85						
	k. Indeks Profesionalitas (IP) ASN Lingkup Setjen (Indeks)	72	73	74	75	76						
	l. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Unit)	1	1	2	2	2						
	m. Persentase Penyelesaian Regulasi lingkup KKP (%)	100	100	100	100	100						
	n. Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan (%)	<15	<14	<13	<12	<11						
	o. Unit kerja Setjen yang menerapkan inovasi pelayanan publik (Unit)	1	1	1	1	1						
	p. Unit kerja Setjen yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	q. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk	60	65	70	75	80						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)// SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Perbaikan Kinerja Setjen (%)											
	r. Indeks Pengelolaan Asset KKP (Indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	s. Indeks Pengelolaan Keuangan KKP (Indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	t. Indeks Perencanaan KKP (Indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	u. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setjen (Nilai)	88	89	89	90	90						
	v. Nilai Kinerja Anggaran Setjen (Nilai)	85	86	87	88	89						
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup KKP dan Inspektorat Jenderal											
	a. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	b. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	c. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan BMN lingkup KKP (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	d. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa lingkup KKP (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	e. Nilai Evaluasi atas Implementasi (pengungkit) Reformasi Birokrasi KKP (nilai)	26	27	28	29	30						
	f. Level Maturitas SPIP KKP (level)	3	3	3	3	3						
	g. Nilai PM SAKIP KKP (nilai)	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)						
	h. Unit Kerja KKP yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (unit)	42	49	56	63	70						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	i. Indeks Persepsi Anti Korupsi KKP (indeks)	-	3,1	3,2	3,3	3,4						
	j. Level Kapabilitas Internal Audit (IACM) Inspektorat Jenderal (level)	3	3	3	3	4						
	k. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup KKP (%)	60	65	70	75	80						
	l. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan (rekomendasi)	18	18	18	18	18						
	m. Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat Jenderal (%)	85	86	87	88	89						
	n. Persentase unit kerja Itjen yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	o. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen (indeks)	72	73	74	75	76						
	p. Nilai IKPA Itjen (nilai)	88	89	89	90	90						
	q. Nilai NKA Itjen (nilai)	85	86	87	88	89						
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap											-
	a. Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (unit)	8	9	10	11	12						
	c. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Perikanan Tangkap	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (%)											
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	72	73	74	75	76						
	e. Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	85	85,15	85,25	85,5	85,75						
	f. Level Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (unit kerja)	1	1	1	1	1						
	j. Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	85	86	87	88	89						
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya											
	a. Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Budidaya (nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (unit)	6	7	8	9	10						
	c. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Perikanan Budidaya dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya (%)											
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (indeks)	72	73	74	75	76						
	e. Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (nilai)	86	86,15	86,25	86,5	86,75						
	f. Level Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Budidaya (level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (unit kerja)	1	1	1	1	1						
	j. Nilai IKPA Ditjen Perikanan Budidaya (nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA Ditjen Perikanan Budidaya (nilai)	85	86	87	88	89						
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan											
	a. Nilai PMPRB Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari	4	5	6	7	8						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Korupsi Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (unit)											
	c. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen PSDKP dibandingkan realisasi anggaran Ditjen PSDKP (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (indeks)	72	73	74	75	76						
	e. Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (nilai)	87	87,15	87,25	87,5	87,75						
	f. Level Maturitas SPIP Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya	1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kelautan dan Perikanan (unit kerja)											
	j. Nilai IKPA Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (nilai)	85	86	87	88	89						
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan											
	a. Nilai PMPRB Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (unit)	2	3	3	4	5						
	c. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen PDSPKP dibandingkan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (indeks)	72	73	74	75	76						
	e. Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (nilai)	84	84,15	84,25	84,5	84,75						
	f. Level Maturitas SPIP Ditjen Penguatan Daya Saing	3	3	3	3	3						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Produk Kelautan dan Perikanan (level)											
	g. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (unit kerja)	1	1	1	1	1						
	j. Nilai IKPA Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (nilai)	85	86	87	88	89						
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut											
	a. Nilai PMPRB Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (unit)	6	7	8	9	10						
	c. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)											
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (indeks)	72	73	74	75	76						
	e. Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (nilai)	83	83,15	83,25	83,5	83,75						
	f. Nilai Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (unit kerja)	1	1	1	1	1						
	j. Nilai IKPA Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (nilai)	85	86	87	88	89						
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan											
	a. Nilai PMPRB Badan Karantina Ikan,	30	31	32	33	34						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)// SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (nilai)											
	b. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (unit)	6	7	8	9	10						
	c. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dibandingkan realisasi anggaran Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (indeks)	72	73	74	75	76						
	e. Nilai PM SAKIP Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (nilai)	86	86,15	86,25	86,5	86,75						
	f. Level Maturitas SPIP Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan	82	84	86	88	90						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Keamanan Hasil Perikanan (%)											
	h. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (unit kerja)	1	1	1	1	1						
	j. Nilai IKPA Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (nilai)	85	86	87	88	89						
	l. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	3,54	3,56	3,58	3,6	3,62						
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan											
	a. Nilai PMPRB Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (unit)	9	10	11	12	13						
	c. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	BPK-RI atas Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dibandingkan realisasi anggaran Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (%)											
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (indeks)	72	73	74	75	76						
	e. Nilai PM SAKIP Lingkup Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (nilai)	86,00	86,15	86,25	86,50	86,75						
	f. Level Maturitas SPIP Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (unit kerja)	1	1	1	1	1						
	j. Nilai IKPA Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (nilai)	88	89	89	90	90						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	k. Nilai NKA Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (nilai)	85	86	87	88	89						
Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP							15,5	19,4	20,5	23,5	26,5	105,4
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hukum dan Organisasi KKP											
	a. Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggungjawab Biro Hukum dan Organisasi (nilai)	9,94	10,08	10,22	10,36	10,50						
	b. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Hukum dan Organisasi (indeks)	72	73	74	75	76						
	Layanan Hukum (layanan)											
	a. Peraturan perundang-undangan bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang tersusun (peraturan)	15	18	21	24	27						
	b. Peraturan perundang-undangan bidang Kesekretariatan, Pengawasan Internal, Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang tersusun (Peraturan)	20	23	26	29	32						
	c. Penanganan masalah hukum di	35	38	40	41	42						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	bidang kelautan dan perikanan (Dokumen)											
	Layanan Manajemen Organisasi (layanan)											
	Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan KKP (dokumen)	11	11	11	11	11						
	Layanan Reformasi Birokrasi (layanan)											
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP (dokumen)	4	4	4	4	4						
Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur							14,8	16,8	19,8	22,8	25,8	100,0
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro SDMA											
	a. Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggungjawab Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (nilai)	7,81	7,92	8,03	8,14	8,25						
	b. Indeks Sistem Merit (indeks)	0,65	0,70	0,80	0,83	0,85						
	c. Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal (nilai)	30	31	32	33	34						
	d. Indeks Profesionalitas ASN KKP	72	73	74	75	76						
	Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia (layanan)											
	a. Layanan Perencanaan, Pengembangan, dan Pembinaan Pegawai (dokumen)	12	12	12	12	12						
	b. Layanan Pengangkatan, Kepangkatan, Pemberhentian Pensiun, dan Mutasi (dokumen)	10	10	10	10	10						
	c. Layanan Pengembangan, Pengelolaan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional (dokumen)	5	5	5	5	5						
	d. Layanan Manajemen Kinerja Individu, Informasi,	18	18	18	18	18						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	dan Ketatausahaan (dokumen)											
Pengelolaan Keuangan KKP							21,0	23,0	26,0	29,0	32,0	131,0
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Biro Keuangan											
	a. Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggungjawab Biro Keuangan (nilai)	3,55	3,6	3,65	3,7	3,75						
	b. Indeks pengelolaan keuangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	c. Indeks pengelolaan aset	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Keuangan (indeks)	72	73	74	75	76						
	Layanan Manajemen Keuangan (layanan)											
	a. Tingkat Kepatuhan Terhadap SPI (%)	100	100	100	100	100						
	b. Tingkat Ketaatan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (%)	100	100	100	100	100						
	c. Kecukupan Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan KKP (%)	100	100	100	100	100						
	d. Kecukupan Informasi Pelaksanaan Anggaran KKP (%)	100	100	100	100	100						
Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerja sama Antarlembaga							48,3	50,3	53,3	56,3	59,3	267,5
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Biro Perencanaan											
	a. Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggungjawab Biro Perencanaan (nilai)	13,67	13,86	14,05	14,25	14,44						
	b. Indeks Perencanaan (indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	c. Nilai SAKIP KKP (nilai)	82,04	82,5	83	83,5	84						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)// SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Perencanaan (indeks)	72	73	74	75	76						
	Layanan Perencanaan (layanan)											
	Terlaksananya Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerja sama Antarlembaga (%)	100	100	100	100	100						
Pengelolaan Administrasi dan Pengadaan Barang/Jasa							252,6	269,3	275,6	283,0	291,9	1.372,4
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa											
	a. Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggungjawab Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (nilai)	1,42	1,44	1,46	1,48	1,5						
	b. Indeks kematangan UKPBJ (indeks)	7	9	9	9	9						
	c. Nilai Pengawasan Kearsipan lingkup KKP (Nilai)	83	83,5	84	84,5	85						
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (indeks)	72	73	74	75	76						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (layanan)											
	Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (%)	100	100	100	100	100						
	Layanan Umum (layanan)											
	a. Persentase pencapaian standar pelayanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan sesuai SOP (%)	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	b. Persentase pencapaian standar pelayanan dalam pengelolaan rumah tangga kantor pusat KKP dan ketatausahaan biro sesuai SOP (%)	86	87	88	89	90						
	c. Persentase pencapaian standar pelayanan pengadaan sesuai SOP (%)	65	67	70	72	75						
	d. Persentase pencapaian standar pemenuhan dukungan layanan pengadaan sesuai SOP (%)	65	67	70	72	75						
	Layanan Perkantoran (layanan)											
	Jumlah pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, dan layanan perkantoran lingkup Sekretariat Jenderal (bulan)	12	12	12	12	12						
Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri							43,782	45,971	48,269	50,683	53,217	241,922
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri											
	a. Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi tanggungjawab Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (nilai)	3,55	3,60	3,65	3,70	3,75						
	b. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri (indeks)	72	73	74	75	76						
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi (layanan)											
	Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang KKP (%)	<15	<14	<13	<12	<11						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)// SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	c. Tingkat kepatuhan pengolahan data kelautan dan perikanan (%)	75	80	85	90	90						
	d. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	e. Nilai Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (nilai)	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2						
	f. Indeks Keamanan Informasi Berbasis Informasi dan Teknologi (nilai)	300	305	310	315	320						
	g. Persentase program kerja reformasi birokrasi bidang tata laksana (nilai)	4	4	4	4	4						
Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan							5,2	6,1	7,2	8,2	9,3	36,0
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup mitra Inspektorat I											
	Pengawasan intern pada mitra Inspektorat I											
	a. Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran lingkup Mitra Inspektorat I (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	b. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Mitra Inspektorat I (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	c. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat I (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	d. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa	70	72,50	75	77,50	80						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	lingkup Mitra Inspektorat I (%)											
	e. Nilai Pengungkit Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat I (nilai)	26	27	28	29	30						
	f. Level Maturitas Implementasi SPI Mitra Inspektorat I (level)	3 (3,4)	3 (3,5)	3 (3,6)	3 (3,7)	3 (3,8)						
	g. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Mitra Inspektorat I (nilai)	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)						
	h. Jumlah Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup Mitra Inspektorat I (unit kerja)	6	7	8	9	10						
	i. Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT (%)	80	80	80	80	80						
	j. Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat I (%)	85	86	87	88	89						
	k. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti lingkup Mitra Inspektorat I (%)	60	65	70	75	80						
	l. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat I (Per Tahun) (rekomendasi)	4	4	4	4	4						
	m. Tingkat Kepatuhan terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat I (%)	100	100	100	100	100						
	n. Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat I (%)	100	100	100	100	100						
Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan							6,5	7,2	8,2	9,2	10,2	41,3

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup mitra Inspektorat II											
	Pengawasan intern pada mitra Inspektorat II											
	a. Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran lingkup Mitra Inspektorat II (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	b. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Mitra Inspektorat II (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	c. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat II (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	d. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa lingkup Mitra Inspektorat II (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	e. Nilai Pengungkit Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat II (nilai)	26	27	28	29	30						
	f. Level Maturitas Implementasi SPI Mitra Inspektorat II (level)	3 (3,4)	3 (3,5)	3 (3,6)	3 (3,7)	3 (3,8)						
	g. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Mitra Inspektorat II (nilai)	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)						
	h. Jumlah Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup Mitra Inspektorat II (unit kerja)	12	14	16	18	20						
	i. Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT (%)	80	80	80	80	80						
	j. Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu	85	86	87	88	89						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat II (%)											
	k. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti lingkup Mitra Inspektorat II (%)	60	65	70	75	80						
	l. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat II (Per Tahun) (rekomendasi)	4	4	4	4	4						
	m. Tingkat Kepatuhan terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat II (%)	100	100	100	100	100						
	n. Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat II (%)	100	100	100	100	100						
Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan							6,8	7,6	8,6	9,6	10,6	43,2
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup mitra Inspektorat III											
	Pengawasan intern pada mitra Inspektorat III											
	a. Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran lingkup Mitra Inspektorat III (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	b. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Mitra Inspektorat III (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	c. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap	70	72,50	75	77,50	80						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat III (%)											
	d. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa lingkup Mitra Inspektorat III (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	e. Nilai Pengungkit Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat III (nilai)	26	27	28	29	30						
	f. Level Maturitas Implementasi SPI Mitra Inspektorat III (level)	3 (3,4)	3 (3,5)	3 (3,6)	3 (3,7)	3 (3,8)						
	g. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Mitra Inspektorat III (nilai)	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)						
	h. Jumlah Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup Mitra Inspektorat III (unit kerja)	15	17	19	21	23						
	i. Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT (%)	80	80	80	80	80						
	j. Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat III (%)	85	86	87	88	89						
	k. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti lingkup Mitra Inspektorat III (%)	60	65	70	75	80						
	l. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat III (Per Tahun) (rekomendasi)	4	4	4	4	4						
	m. Tingkat Kepatuhan terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat III (%)	100	100	100	100	100						
	n. Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Akuntabel Lingkup Inspektorat III (%)											
	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan						5,8	6,7	7,7	8,7	9,8	38,7
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup mitra Inspektorat IV											
	Pengawasan intern pada mitra Inspektorat IV											
	a. Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	b. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	c. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	d. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	e. Nilai Pengungkit Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat IV (nilai)	26	27	28	29	30						
	f. Level Maturitas Implementasi SPI Mitra Inspektorat IV (level)	3 (3,4)	3 (3,5)	3 (3,6)	3 (3,7)	3 (3,8)						
	g. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Mitra Inspektorat IV (nilai)	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)						
	h. Jumlah Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK	9	11	13	15	17						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)// SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	lingkup Mitra Inspektorat IV (kumulatif) (unit kerja)											
	i. Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT (%)	80	80	80	80	80						
	j. Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	85	86	87	88	89						
	k. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	60	65	70	75	80						
	l. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat IV (Per Tahun) (rekomendasi)	4	4	4	4	4						
	m. Tingkat Kepatuhan terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat IV (%)	100	100	100	100	100						
	n. Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat IV (%)	100	100	100	100	100						
Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat V dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan							5,8	6,7	7,7	8,7	9,7	38,6
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup mitra Inspektorat V											
	Pengawasan intern pada mitra Inspektorat V dan pengawasan dengan tujuan tertentu lingkup KKP											
	a. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan BMN lingkup Mitra Inspektorat V (%)	70	72,50	75	77,50	80						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	b. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Mitra Inspektorat V	70	72,50	75	77,50	80						
	c. Indeks Persepsi Anti Korupsi KKP (indeks)	-	3,1	3,2	3,3	3,4						
	d. Nilai Pengungkit Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat V (nilai)	26	27	28	29	30						
	e. Level Maturitas Implementasi SPI Mitra Inspektorat V	3 (3,4)	3 (3,5)	3 (3,6)	3 (3,7)	3 (3,8)						
	f. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Mitra Inspektorat V	A (87)	A (87,25)	A (87,50)	A (87,75)	A (88)						
	g. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti lingkup Mitra Inspektorat V	60	65	70	75	80						
	h. Persentase Jumlah Rekomendasi Pengawasan Tujuan Tertentu yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja KKP	60	65	70	75	80						
	i. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100						
	j. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat V (Per Tahun)	2	2	2	2	2						
	k. Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT	80	80	80	80	80						
	l. Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat V (%)	85	86	87	88	89						
	m. Tingkat Kepatuhan terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat V (%)	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)// SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	n. Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat V (%)	100	100	100	100	100						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan							55,2	57,3	59,4	61,8	64,3	298,0
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal											
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I											
	a. Nilai pengungkit Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal (nilai)	26	27	28	29	30						
	b. Level Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal (level)	3 (3,4)	3 (3,5)	3 (3,6)	3 (3,7)	3 (3,8)						
	c. Nilai PM SAKIP Inspektorat Jenderal (nilai)	A (87)	A (87,25)	A (87,50)	A (87,75)	A (88)						
	d. Level kapabilitas Inspektorat Jenderal (IACM) (level)	3	3	3	3	4						
	e. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal (%)	60	65	70	75	80						
	f. Indeks persepsi pegawai KKP Terhadap kinerja pengawasan Inspektorat Jenderal (Indeks)	4	4,05	4,10	4,15	4,20						
	g. Indeks profesionalitas ASN lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal (indeks)	72	73	74	75	76						
	h. Persentase pegawai Inspektorat Jenderal yang memenuhi standar (%)	70	72	74	76	78						
	i. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Sekretariat	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)// SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Inspektorat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal (%)											
	j. Nilai IKPA Sekretariat Inspektorat Jenderal (nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat Inspektorat Jenderal (nilai)	85	86	87	88	89						
	l. Tingkat kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Inspektorat Jenderal (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	m. Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Inspektorat Jenderal (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	n. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal (%)	82	84	86	88	90						
	o. Persentase implementasi sistem informasi pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal (%)	82	84	86	88	90						
	p. Persentase publikasi informasi dan kinerja pengawasan Intern KKP secara aktual (%)	80	82	84	86	88						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (layanan)											
	Persentase pemenuhan fasilitas perkantoran sesuai kebutuhan tahunan Inspektorat Jenderal (%)	100	100	100	100	100						
	Layanan Perkantoran (layanan)											
	a. Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Inspektorat Jenderal (%)	100	100	100	100	100						
	b. Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	pegawai Inspektorat Jenderal secara tepat waktu (%)											
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap							406,4	430,7	455,2	479,8	498,3	2.270,4
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I											
	a. Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Indeks profesionalitas ASN Seditjen Perikanan Tangkap (indeks)	72	73	74	75	76						
	c. Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	8	9	10	11	12						
	d. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Perikanan Tangkap dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	e. Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	85	85,15	85,25	85,5	85,75						
	f. Level Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase unit kerja Seditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Seditjen Perikanan Tangkap (%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)// SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	j. Nilai IKPA lingkup Sesditjen Perikanan Tangkap (nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA lingkup Sesditjen Perikanan Tangkap (nilai)	85	86	87	88	89						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							-				-
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (%)	100	100	100	100	100						
	Layanan Perkantoran											
	Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (bulan)	12	12	12	12	12						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya							336,5	350,6	397,8	445,9	499,4	2.030,2
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I											
	a. Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Budidaya (nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Indeks profesionalitas ASN Sesditjen Perikanan Budidaya (indeks)	72	73	74	75	76						
	c. Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	6	7	8	9	10						
	d. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Perikanan Budidaya dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	e. Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Budidaya (nilai)	86	86,15	86,25	86,5	86,75						
	f. Level Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Budidaya (level)	3	3	3	3	3						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	g. Persentase unit kerja Sesditjen PB yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sesditjen PB (%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1	1	1	1	1						
	j. Nilai IKPA lingkup Sesditjen PB (nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA lingkup Sesditjen PB (nilai)	85	86	87	88	89						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal											
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal (%)	100	100	100	100	100						
	Layanan Perkantoran											
	a. Jumlah pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (bulan layanan)	12	12	12	12	12						
	b. Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budidaya (bulan layanan)	12	12	12	12	12						
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan						247,2	286,6	303,4	317,5	324,8	1.479,4
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I											
	a. Nilai PMPRB Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Indeks profesionalitas ASN Sesditjen PSDKP (indeks)	72	73	74	75	76						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	a. Jumlah pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan (bulan)	12	12	12	12	12						
	b. Jumlah pemenuhan layanan perkantoran (bulan)	12	12	12	12	12						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan							127,6	140,3	190,1	209,0	213,5	880,4
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I											
	a. Nilai PMPRB Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Indeks profesionalitas ASN Sesditjen PDSPKP (indeks)	72	73	74	75	76						
	c. Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	2	3	3	4	5						
	d. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen PDSPKP dibandingkan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	e. Nilai PM SAKIP Ditjen PDSPKP (nilai)	84	84,15	84,25	84,5	84,75						
	f. Level Maturitas SPIP Ditjen PDSPKP (level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase unit kerja Sesditjen PDSPKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sesditjen PDSPKP (%)	60	65	70	75	80						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1	1	1	1	1						
	j. Nilai IKPA lingkup Sesditjen PDSPKP(nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA lingkup Sesditjen PDSPKP (nilai)	85	86	87	88	89						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal											
	Persentase pemenuhan layanan internal/ <i>overhead</i> lingkup Sekretariat Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	100	100	100	100	100						
	Layanan Perkantoran											
	Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (bulan)	12	12	12	12	12						
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Ruang Laut						169,7	193,9	214,6	235,0	256,0	1.069,2
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I											
	a. Nilai PMPRB Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Indeks profesionalitas ASN Sesditjen PRL (indeks)	72	73	74	75	76						
	c. Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	6	7	8	9	10						
	d. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen PRL dibandingkan realisasi anggaran Ditjen PRL (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	e. Nilai PM SAKIP Ditjen PRL (nilai)	83	83,15	83,25	83,5	83,75						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)// SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	f. Level Maturitas SPIP Ditjen PRL (level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase unit kerja Sesditjen PRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sesditjen PRL(%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1	1	1	1	1						
	j. Nilai IKPA lingkup Sesditjen PRL(nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA lingkup Sesditjen PRL (nilai)	85	86	87	88	89						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal											
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal/ <i>overhead</i> lingkup Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	100	100	100	100	100						
	Layanan Perkantoran											
	Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Sekretariat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (bulan)	12	12	12	12	12						
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan						439,4	463,3	497,5	532,1	576,0	2.508,3
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I											
	a. Nilai PMPRB Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Indeks profesionalitas ASN Sekretariat BKIPM (indeks)	72	73	74	75	76						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	c. Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	6	7	8	9	10						
	d. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) BKIPM dibandingkan realisasi anggaran BKIPM (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	e. Nilai PM SAKIP BKIPM (nilai)	86	86,15	86,25	86,5	86,75						
	f. Level Maturitas SPIP BKIPM (level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase unit kerja Set BKIPM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Set BKIPM(%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1	1	1	1	1						
	j. Nilai IKPA lingkup Set BKIPM(nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA lingkup Set BKIPM(nilai)	85	86	87	88	89						
	l. Indeks persepsi kualitas pelayanan	3,54	3,56	3,58	3,6	3,62						
	Layanan Dukungan Manajemen Satker											
	Jumlah layanan dukungan manajemen satker (layanan)	1	1	1	1	1						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal											
	Persentase pemenuhan layanan internal/ <i>overhead</i> lingkup Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (%)	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)// SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Layanan Perkantoran											
	a. Jumlah pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (bulan)	12	12	12	12	12						
	b. Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (bulan)	12	12	12	12	12						
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan						930,1	985,9	1.079,3	1.178,8	1.273,5	5.447,6
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I											
	a. Nilai PMPRB Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Indeks profesionalitas ASN Sekretariat BRSDMKP (indeks)	72	73	74	75	76						
	c. Unit kerja yang berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi	9	10	11	12	13						
	d. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) BRSDMKP dibandingkan realisasi anggaran BRSDMKP (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	e. Nilai PM SAKIP BRSDMKP (nilai)	86	86,15	86,25	86,5	86,75						
	f. Level Maturitas SPIP BRSDMKP (level)	3	3	3	3	3						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)// SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	g. Persentase unit kerja Set BRSDMKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Set BRSDM(%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1	1	1	1	1						
	j. Nilai IKPA lingkup Set BRSDMKP (nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA lingkup Set BRSDMKP (nilai)	85	86	87	88	89						
	Layanan Dukungan Manajemen Satker											
	Jumlah layanan dukungan manajemen satker (layanan)	1	1	1	1	1						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal											
	a. Tersedianya sarana dan prasarana Sekretariat Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (layanan)	1	1	1	1	1						
	b. Tersedianya sarana dan prasarana Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (layanan)	1	1	1	1	1						
	Layanan Perkantoran											
	a. Jumlah pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan lingkup Sekretariat Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (bulan)	12	12	12	12	12						
	b. Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup Sekretariat Badan Riset Sumber Daya	12	12	12	12	12						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)// SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Manusia Kelautan dan Perikanan (bulan)											
	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan						21,6	22,8	23,9	25,0	26,7	120,0
	Pendidikan Aparatur Kelautan dan Perikanan											
	Jumlah Pendidikan Aparatur KP (orang)	195	180	185	190	205						
	Aparatur Kelautan dan Perikanan yang kompeten											
	Jumlah aparatur kelautan dan perikanan yang dilatih (orang)	2.280	3.050	3.150	3.180	3.325						
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi						757,5	859,1	918,0	974,2	1.030,0	4.538,8
	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan peserta diklat yang terserap di di Dunia Usaha dan Dunia Industri											
	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (orang)	16.862	17.491	18.081	18.691	19.291						
	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan peserta diklat yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan)											
	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) (orang)	193	205	215	225	255						
	Kelompok kelautan dan perikanan mandiri yang dibentuk											
	a. Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (kelompok)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
	b. Kelompok kelautan dan perikanan yang	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)// SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	ditingkatkan kelasnya (kelompok)											
	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi hasil kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang dimanfaatkan oleh masyarakat											
	Desa/kawasan mitra yang menerapkan iptek KP (paket)	6	6	6	6	6						
	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan meningkat											
	Persentase peningkatan PNPB SDMKP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							179,4	213,5	226,6	249,2	268,2	1.136,9
	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih											
	Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih (orang)	25.200	26.000	27.000	28.000	30.000						
	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang bersertifikat kompetensi											
	Jumlah SDM kelautan dan perikanan yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)	3.500	5.250	6.500	8.500	10.000						
	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan											
	Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh (orang)	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000						
	Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan											
	Satuan pelatihan kelautan dan perikanan yang terstandar (unit)	7	7	7	7	10						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan											
	Jumlah percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan yang diterapkan (unit)	34	34	40	45	50						
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan											
	Jumlah layanan pendidikan dan pelatihan (layanan)	1	1	1	1	1						
Pendidikan Kelautan dan Perikanan							578,1	645,6	691,4	725,0	761,8	3.401,9
	Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten											
	Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (orang)	8.239	9.173	10.633	12.286	13.115						
	Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan											
	Jumlah pengabdian pendidikan tinggi KP (paket)	17	17	17	17	17						
	Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan											
	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan KP (unit)	21	22	22	22	22						
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan											
	Jumlah layanan pendidikan dan pelatihan (layanan)	1	1	1	1	1						
	Layanan Dukungan Manajemen Satker											
	Jumlah layanan dukungan manajemen satker (layanan)	1	1	1	1	1						
	Layanan Perkantoran											
	a. Jumlah layanan perkantoran (layanan)	1	1	1	1	1						
	b. Gaji dan tunjangan (bulan)	12	12	12	12	12						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Luasan Kawasan Konservasi baru (Ha)	700.000	800.000	900.000	900.000	900.000						
	Kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang operasional											
	Kawasan konservasi yang operasional (kumulatif) (Ha)	10.000.000	14.500.000	17.500.000	19.000.000	20.000.000						
	Kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan											
	Luas kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (kumulatif) (Ha)	10.000.000	14.500.000	17.500.000	19.000.000	20.000.000						
	Keanekaragaman hayati perairan terancam punah yang dilindungi dan/atau dilestarikan											
	Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dan/atau dilestarikan (jenis)	6	10	14	18	20						
	Keanekaragaman Hayati perairan yang dikelola pemanfaatannya secara berkelanjutan											
	Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (jenis)	5	12	16	18	20						
	Jejaring, Kemitraan/Kerja sama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut											
	a. Konvensi dan Kerja sama Konservasi yang mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut (kerja sama)	5	5	5	5	5						
	b. Jejaring kemitraan konservasi yang mendukung konservasi keanekaragaman hayati laut (Kelompok)	20	5	5	5	5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Kepulauan Mentawai Yang Mandiri											
	Tingkat kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai (skala 1-5)	4	4	4	4	4						
Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							44,5	67,0	72,0	82,2	87,5	353,2
	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim											
	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan)	12	12	12	12	12						
	Kawasan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi											
	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (lokasi)	16 (200 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)						
	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran											
	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran (kawasan)	8	6	6	5	5						
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							2.034,7	2.810,5	3.327,7	3.599,7	3.955,5	15.728,0
	Kesejahteraan Nelayan Meningkat											-
	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	102	103	105	106	107						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Rata-rata pendapatan nelayan (Rp juta/orang/bulan)	3,95	4,23	4,55	4,91	5,36						-
	Kesejahteraan Pembudi daya Ikan meningkat											
	Nilai Tukar Pembudi daya Ikan (NTPi)	101	102	103	104	105						
	Rata-rata pendapatan pembudi daya (Rp juta/orang/bulan)	3,45	3,50	3,55	3,65	3,70						
	Kesejahteraan petambak garam meningkat											
	Nilai tukar petambak garam (indeks)	102,75	103,00	103,25	103,50	103,75						
	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat											
	Tingkat partisipasi Pokmaswas dalam mendukung pengawasan SDKP (%)	85	86	87	88	89						
	Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat											
	a. Nilai investasi kelautan dan perikanan (Rp.Triliun)	5,21	5,49	5,79	6,10	6,43						
	b. Persentase peningkatan PNBP dari Sektor KP	5	7,5	10	12,5	15						
	c. Kinerja logistik hasil perikanan (indeks)	52	54	56	58	60						
	d. Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp Triliun)	3	3,3	3,6	3,9	4,2						
	e. Persentase Pencapaian Target PNBPU BLU LPMUKP	95	95	96	96	97						
	f. Persentase penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP (%)	95	96	97	98	100						
	g. Ikan dan hasil perikanan ekspor dan domestik tidak berasal dari <i>destructive fishing</i> (lokasi)	5	5	5	5	5						
	h. Persentase pencegahan impor, ekspor, antararea	90	90	90	90	90						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (kumulatif) (orang)	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000						
	Rekomendasi teknis, rancangan teknis Standar Nasional Indonesia, sertifikasi, dan kerjasama pemanfaatan teknologi penangkapan ikan											
	Jumlah rekomendasi teknis, rancangan teknis Standar Nasional Indonesia, sertifikasi, dan kerjasama pemanfaatan teknologi penangkapan ikan (dokumen) (kumulatif)	16	23	30	37	44						
	Kapal perikanan yang terdaftar											
	Jumlah kapal perikanan yang terdaftar sebagai kapal perikanan (kumulatif) (unit)	11.500	12.250	13.200	14.350	15.700						
	Kapal perikanan bantuan yang terbangun											
	Jumlah kapal perikanan bantuan yang terbangun (unit)	30	50	70	90	110						
	Alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terkelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar											
	Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terkelola sesuai rancangan teknis dan memenuhi standar (unit)	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
	Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang terbangun											
	Jumlah alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu	500	750	1.000	1.250	1.500						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah pengembangan PPS (lokasi)	7	7	7	7	7						
	Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang meningkat operasionalnya											
	Tingkat operasional PPS (%)	80	81	82	83	84						
	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang ditingkatkan fasilitasnya											
	Jumlah Pengembangan PPN (lokasi)	17	18	19	20	21						
	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang meningkat operasionalnya											
	Tingkat operasional PPN (%)	80	81	82	83	84						
	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang ditingkatkan fasilitasnya											
	Jumlah Pengembangan PPP (lokasi)	12	3	4	5	6						
	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang meningkat operasionalnya											
	Tingkat operasional PPP (%)	75	76	77	78	79						
	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang ditingkatkan fasilitasnya											
	Jumlah Pengembangan PPI (lokasi)	1	2	3	4	5						
	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang meningkat operasionalnya											
	Tingkat operasional PPI (%)	67	68	69	70	71						
	Pelabuhan Perikanan yang diusulkan penetapan kelasnya											
	Jumlah pelabuhan perikanan yang diusulkan penetapan kelasnya (lokasi)	20	25	30	35	40						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah nelayan yang diidentifikasi sebagai penerima bantuan premi asuransi nelayan (orang)	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000						
	Nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap											
	Jumlah nelayan yang terfasilitasi kredit perikanan tangkap (nelayan)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
	Keluarga nelayan yang difasilitasi diversifikasi usahanya											
	Jumlah diversifikasi usaha keluarga nelayan (kumulatif) (RTP)	2.900	4.000	5.000	6.000	7.000						
	Sertifikasi hak atas tanah nelayan yang difasilitasi sertifikasinya											
	Jumlah fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan (SeHAT) (bidang)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000						
	Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya											
	Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya (kumulatif) (kelompok)	2.250	2.400	2.550	2.750	3.000						
	Kawasan sentra/kampung nelayan yang difasilitasi penataannya											
	Jumlah kawasan sentra/kampung nelayan yang difasilitasi penataannya (lokasi)	40	40	40	40	40						
	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang Mandiri											
	Tingkat Kemandirian SKPT Natuna (skala 1-5)	4	4	4	4	4						
	Kampung Nelayan Maju											
	Jumlah kampung nelayan maju	0	10	10	15	20						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)// SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah benih ikan air payau yang didistribusikan ke masyarakat (ekor)	158.520.000	159.000.000	160.000.000	161.000.000	162.000.000						
	Benih bermutu ikan air laut yang didistribusikan ke masyarakat											
	Jumlah benih ikan air laut yang didistribusikan ke masyarakat (ekor)	8.277.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000	10.500.000						
	Bibit rumput laut yang didistribusikan ke masyarakat											
	Jumlah bantuan bibit rumput laut yang didistribusikan ke masyarakat (kg)	200.000	350.000	400.000	450.000	500.000						
	Bantuan sarana prasarana dan percontohan benih ikan (kebun bibit kultur jaringan)											
	Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan perbenihan ikan (paket)	80	110	120	140	150						
	Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang perbenihan (sertifikat CPIB)											
	Jumlah pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang perbenihan (paket)	500	500	500	500	500						
Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan							156,5	302,8	347,1	374,9	390,7	1.572,0
	Sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan											
	Jumlah sampel yang diuji melalui laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (sampel)	50.000	57.000	64.000	70.000	78.000						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)// SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang kawasan dan kesehatan ikan (monitoring residu)											
	a. Jumlah pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang kawasan dan kesehatan ikan (sampel)	10.000	14.000	18.000	22.000	26.000						
	b. Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang kawasan dan kesehatan ikan (paket)	200	225	250	275	300						
	c. Jumlah Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor bidang kawasan dan kesehatan ikan (paket)	5	5	7	9	11						
	Bantuan sarana prasarana dan percontohan kawasan dan kesehatan ikan											
	Jumlah bantuan sarana prasarana perikanan budidaya dan percontohan kawasan dan kesehatan ikan (paket)	38	100	110	120	125						
	Rehabilitasi sarana prasarana UPT											
	Jumlah rehabilitasi sarana prasarana UPT (unit)	15	15	15	15	15						
	RSNI 3 perikanan budidaya											
	Jumlah RSNI 3 perikanan budidaya (dokumen)	10	12	14	16	18						
	Percontohan pengelolaan kluster kawasan budidaya berkelanjutan											
	a. Jumlah percontohan pengelolaan kluster	10	20	30	40	50						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (pulau)	10	12	10	10	8						
Perencanaan Ruang Laut							26,2	32,9	28,1	29,1	26,1	142,4
	Perairan laut antarwilayah yang memiliki dokumen rencana zonasi kawasan antarwilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan											
	Jumlah perairan laut antarwilayah yang memiliki dokumen rencana zonasi kawasan antarwilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan dan rencana aksi pengelolaan ruang laut (perairan laut)	6	6	4	0	0						
	Kawasan strategis nasional dan kawasan strategis nasional tertentu yang memiliki rencana zonasi KSN dan rencana zonasi KSNT yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan											
	Jumlah KSN dan KSNT yang memiliki rencana zonasi KSN dan rencana zonasi KSNT yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan (kawasan)	25	28	19	9	5						
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut											
	a. Jumlah perizinan lokasi di wilayah perairan pesisir dan laut (lokasi)	10	12	14	16	18						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	b. Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah (lokasi)	12	27	26	40	46						
	Provinsi yang memiliki dokumen penyelenggaraan rencana zonasi											
	Jumlah provinsi yang memiliki dokumen monitoring evaluasi/kajian peninjauan kembali/peraturan turunan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (provinsi)	13	24	29	24	31						
	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya yang mandiri											
	Tingkat Kemandirian SKPT Kabupaten Maluku Barat Daya (Moa) (skala 1-5)	4	4	4	4	4						
	Pemantauan, Operasi Armada, dan Infrastruktur Pengawasan						723,9	844,5	1.036,3	1.104,1	1.253,2	4.962,1
	Operasional kapal pengawas											
	Jumlah hari operasional kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan <i>IUU Fishing</i> dan merusak sumber daya kelautan dan perikanan di WPPNRI (hari operasi)	150	180	180	180	180						
	Operasional Pesawat Patroli											
	Jumlah hari operasi pesawat patroli (hari operasi)	150	180	180	180	180						
	Awak kapal pengawas yang kompeten											
	Jumlah awak kapal pengawas yang kompeten (orang)	285	325	375	400	415						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)// SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Armada Pengawasan yang siap operasi											
	Jumlah armada pengawasan yang siap operasi (unit)	103	116	129	142	155						
	Sistem pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang operasional dan terintegrasi											
	Jumlah sistem pemantauan SDKP yang operasional dan terintegrasi (sistem)	1	2	2	1	1						
	Operasional <i>Speed Boat/ Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat</i>											
	Jumlah hari operasional <i>speed boat/ rigid inflatable boat/ rubber boat</i> (hari operasi)	50	50	50	50	50						
	Kapal pengawas yang dibangun											
	Jumlah kapal pengawas yang dibangun (unit)	2	3	3	3	3						
	<i>Speed Boat</i> pengawas yang dibangun											
	Jumlah <i>speed boat</i> pengawas yang dibangun (unit)	11	10	10	10	10						
	Kelompok Masyarakat Pengawas Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP											
	Jumlah POKMASWAS yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP (kelompok)	1010	1050	1100	1150	1200						
	Bangunan/pos pengawasan yang dibangun											
	Jumlah bangunan/pos pengawasan yang dibangun (unit)	18	15	15	15	15						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)// SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	perikanan yang ditangani secara akuntabel											
	Jumlah barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani secara akuntabel (kasus)	150	200	200	200	200						
	Nelayan yang difasilitasi pemulangannya dan pemberian pemahaman untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain											
	Jumlah nelayan yang difasilitasi pemulangannya dan pemberian pemahaman untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain (orang)	400	400	400	400	400						
	Forum kerja sama penanganan pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan											
	Jumlah forum koordinasi penanganan pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang terselenggara (forum)	2	2	2	2	2						
	PPNS Perikanan/aparat penegak hukum di bidang kelautan dan perikanan yang kompeten											
	Jumlah PPNS Perikanan/aparat penegak hukum di bidang kelautan dan perikanan yang kompeten (orang)	60	30	60	30	60						
	Operasional Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal											
	Jumlah layanan operasional Satuan Tugas Pemberantasan	4	4	4	4	4						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)// SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	kecil, dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya											
	Jumlah pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau- pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya (pelaku usaha)	55	80	100	130	140						
	Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Kompeten											
	Jumlah polisi khusus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kompeten (orang)	65	30	30	30	30						
	Pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan <i>destructive fishing</i>											
	Jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan <i>destructive fishing</i> (pelaku usaha)	270	360	410	510	585						
	Pelaku usaha sumber daya kelautan yang diverifikasi hasil pemeriksaan kepatuhannya											
	Jumlah pelaku usaha sumber daya kelautan yang diverifikasi hasil pemeriksaan kepatuhannya	550	575	600	625	650						
	Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya											
	Jumlah pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya (pelaku usaha)	95	115	130	145	155						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)// SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	pemeriksaan kepatuhannya											
	Jumlah pelaku usaha sumber daya perikanan yang diverifikasi hasil pemeriksaan kepatuhannya (pelaku usaha)	1.873	2.297	2.330	2.365	2.410						
	Masyarakat kelautan dan perikanan yang mengikuti penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang tertib dan bertanggung jawab											
	Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang mengikuti penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang tertib dan bertanggung jawab (orang)	680	750	800	800	800						
	Pengawas Perikanan yang kompeten											
	Jumlah Pengawas Perikanan yang kompeten (orang)	230	400	400	450	500						
Karantina Ikan							78,9	95,2	104,3	109,9	117,2	505,5
	Laporan penindakan pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan											
	Persentase kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan yang diselesaikan (%)	95	95	95	95	95						
	Sebaran jenis ikan yang dilarang dan bersifat invasif yang teridentifikasi											
	a. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi (lokasi)	94	96	98	100	102						
	b. Persentase pencegahan impor, ekspor, antararea jenis ikan yang dilarang,	90	90	90	90	90						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sarana dan prasarana pengawasan karantina (lokasi)	25	28	30	32	32						
Standardisasi Sistem dan Kepatuhan							32,4	37,1	40,2	48,3	55,4	213,4
	Parameter uji laboratorium acuan dan laboratorium penguji											
	a. Jumlah parameter uji yang dihasilkan oleh laboratorium acuan (RSNI, validasi metode, uji profisiensi, kontrol positif, dan <i>rapid test</i>) (parameter)	29	29	29	29	29						
	b. Jumlah penambahan ruang lingkup paramater uji yang terakreditasi di UPT Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (parameter)	94	95	95	95	95						
	c. Jumlah unit kerja yang dapat melakukan pengujian parameter <i>destructive fishing</i> (unit kerja)	5	6	6	6	6						
	Lokasi wilayah perbatasan yang terlayani dan terawasi											
	Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)	77	78	79	80	81						
	Penerapan sistem jaminan kehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan											
	a. Unit kerja yang menerapkan sistem pengendalian (<i>Official Control</i>) lingkup otoritas kompeten (unit kerja)	150	150	150	150	150						
	b. Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen biorisiko laboratorium (SNI	7	7	7	7	7						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)// SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik yang dibina dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan	50	25	30	35	40						
	Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan											
	Jumlah sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan yang disediakan	31	35	35	40	45						
	Sarana distribusi hasil perikanan yang disediakan											
	Jumlah sarana distribusi hasil perikanan yang disediakan	41	41	41	45	50						
	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Timika, Kabupaten Mimika yang mandiri											
	Tingkat kemandirian SKPT Timika (skala 1-5)	4	5	5	5	5						
	Fasilitas penataan rantai pasok hasil perikanan di daerah											
	Jumlah provinsi yang difasilitasi melakukan penataan rantai pasok hasil perikanan (provinsi)	34	34	34	34	34						
	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan						19,3	19,5	19,8	21,0	22,2	101,8
	Peningkatan kapasitas lembaga usaha kelautan dan perikanan											
	Jumlah lembaga usaha hasil kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (lembaga)	20	30	35	40	45						
	Terlaksananya promosi usaha dan investasi											
	Jumlah promosi usaha dan investasi (dokumen)	5	5	5	5	5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan											
	Jumlah wirausaha hasil kelautan dan perikanan yang ditumbuhkan	200	200	200	200	200						
	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak, Kabupaten Biak Numfor yang mandiri											
	Tingkat kemandirian SKPT Biak	4	5	5	5	5						
	Fasilitasi akses pembiayaan kredit program (Dekonsentrasi)											
	Provinsi yang terfasilitasi akses pembiayaan kredit program	10	34	34	34	34						
	Terselenggaranya <i>Marine and Fisheries Business and Investment Forum</i>											
	Jumlah <i>Marine and Fisheries Business and Investment Forum</i> yang diselenggarakan	12	12	12	12	12						
	Pelaku usaha yang difasilitasi kemudahan berusaha dan berinvestasinya											
	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam kegiatan berusaha dan berinvestasi	1510	1620	1730	1840	1950						
Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan							69,1	71,1	73,7	76,5	79,2	369,6
	Layanan pengelolaan penyaluran modal usaha (layanan)											
	a. Realisasi UMKM kelautan dan perikanan penerima modal usaha (KUKP)	35.985	9.820	9.264	8.740	8.245						
	b. Rasio piutang bermasalah terhadap <i>outstanding</i> dana bergulir (%)	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)// SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri							154,8	239,3	355,4	378,5	343,0	1.471,2
	Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan meningkat											
	Nilai tukar pengolah hasil perikanan (indeks)	103,75	104,00	104,25	104,50	104,75						
	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat											
	a. Nilai ekspor hasil perikanan (USD Miliar)	6,17	6,63	7,13	7,66	08,00						
	b. Konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	56,39	58,08	59,53	61,02	62,05						
	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing											
	a. Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor (negara)	137	137	137	137	137						
	b. Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor (%)	98	98	98	98	98						
	c. Penjaminan mutu hasil perikanan domestik (lokasi)	80	80	80	80	80						
	d. Volume produk olahan kelautan dan perikanan berdaya saing (juta ton)	6,9	7,05	7,2	7,35	7,5						
Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan							62,0	132,7	238,7	244,4	196,0	873,8
	Pengadaan Moda Sarana Pemasaran											
	Jumlah sarana pemasaran roda 2/3 yang disediakan (paket)	50	50	50	50	50						
	Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)											
	a. Jumlah menu inovasi masakan berbahan baku ikan yang dikembangkan	68	68	68	68	68						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	a. Persentase utilitas UPI (persen)	60	66	67	68	70						
	b. Pemetaan kebutuhan bahan baku untuk UPI ICS (dokumen)	2	2	2	2	2						
	Fasilitasi sarana rantai dingin dan pengolahan kepada UMKM											
	Jumlah sarana dan prasarana sistem rantai dingin dan pengolahan yang disediakan (unit)	400	500	500	500	500						
	Ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah di lokasi yang dibina											
	Jumlah ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah di lokasi yang dibina (ragam)	28	28	28	28	28						
	Sarana dan prasarana unit penanganan/pengolahan ikan yang ditingkatkan fasilitasnya											
	Jumlah sarana dan prasarana unit penanganan/Pengolahan ikan yang ditingkatkan fasilitasnya (unit)	10	20	30	40	50						
	UPI bernilai tambah menuju Zero Waste											
	Jumlah UPI bernilai tambah yang dibangun menuju zero waste (lokasi)	2	2	2	2	2						
	Layanan pra penerbitan SKP di daerah (Dekonsentrasi)											
	Jumlah layanan pra penerbitan SKP di daerah (provinsi)	34	34	34	34	34						
	Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan						9,0	11,9	15,1	18,5	22,2	76,7

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Rekayasa dan uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dihasilkan											
	a. Jumlah produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang direkayasa (produk)	10	10	10	10	10						
	b. Jumlah produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang diujiterapkan (produk)	5	5	5	5	5						
	Bahan RSNI produk kelautan dan perikanan yang disiapkan											
	Jumlah bahan RSNI produk kelautan dan perikanan yang disiapkan (bahan RSNI)	3	3	3	3	3						
	Layanan sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan											
	Jumlah layanan sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan (produk)	60	70	80	90	100						
	Data hasil pengujian produk kelautan dan perikanan											
	Jumlah data hasil pengujian nutrisi dan mutu produk kelautan dan perikanan (data uji)	1000	1100	1200	1300	1400						
	Pelaku usaha yang dibina dalam inkubator bisnis											
	Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam inkubator bisnis (UMKM)	18	20	22	24	26						
	Jumlah Layanan bisnis pengembangan usaha (lokasi)	4	4	4	4	4						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)// SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Diseminasi informasi pengujian penerapan hasil kelautan dan perikanan											
	Jumlah peserta diseminasi informasi pengujian penerapan hasil kelautan dan perikanan (orang)	500	600	700	800	900						
Pengendalian Mutu							50,5	60,3	62,5	70,7	76,3	320,2
	Registrasi unit pengolahan ikan di negara tujuan ekspor											
	Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (dokumen)	4	4	4	4	4						
	Laporan pengawasan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang ditangani											
	Persentase penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan (%)	100	100	100	100	100						
	Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan domestik											
	Penjaminan mutu hasil perikanan domestik (lokasi)	80	82	84	86	88						
	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem <i>traceability</i>											
	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem <i>traceability (UPI)</i>	200	200	200	200	200						
	Operasional pengawasan mutu produk hasil perikanan											
	a. Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di pintu pemasukan wilayah Republik Indonesia (%)	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)// SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	untuk penyusunan kebijakan											
	a. Rekomendasi hasil riset kelautan dan perikanan yang digunakan dalam penyusunan kebijakan (paket)	24	24	28	28	30						
	b. Hasil riset kelautan dan perikanan yang digunakan sebagai bahan penyusunan RSNI (paket)	1	1	1	1	1						
	c. Data, informasi, dan peta hasil riset kelautan dan perikanan yang digunakan dalam penyusunan kebijakan (paket)	11	11	11	11	11						
	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan meningkat											
	Persentase peningkatan PNBK SDMP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan							14,4	15,3	16,4	17,5	18,6	82,2
	Rekomendasi kebijakan hasil riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan											
	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan (paket)	7	7	7	7	7						
	Teknologi hasil riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan											
	Jumlah teknologi hasil riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan (paket)	6	6	7	7	7						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)// SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)// INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Data dan/atau informasi hasil riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan yang dihasilkan											
	Jumlah data dan/atau informasi hasil riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan yang dihasilkan (paket)	5	5	5	5	5						
	Sarana dan prasarana riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan											
	Jumlah sarana dan prasarana riset pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan (paket)	1	1	1	1	1						
	Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) hasil riset pengolahan produk kelautan dan perikanan											
	Jumlah Penerapan TAL hasil riset pengolahan produk kelautan dan perikanan (paket)	1	1	1	1	1						
Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan							8,4	10,6	11,7	12,3	13,4	56,4
	Data dan/atau informasi hasil riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan											
	Jumlah data dan/atau informasi hasil riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan (paket)	1	1	1	1	1						
	Model sosial ekonomi sektor kelautan dan perikanan											
	Jumlah model sosial ekonomi sektor kelautan dan perikanan (paket)	6	6	6	6	6						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Rekomendasi kebijakan hasil riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan											
	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan (paket)	10	10	12	12	14						
	Sarana dan prasarana riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan											
	Jumlah sarana dan prasarana riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan (paket)	1	1	1	1	1						
	Penerapan model integrasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan											
	Jumlah penerapan model integrasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan (paket)	2	1	1	1	1						
Riset Perikanan							75,1	101,1	115,7	119,8	130,8	542,5
	Rekomendasi kebijakan hasil riset perikanan											
	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil riset perikanan (paket)	15	15	18	20	20						
	Data dan/atau informasi stok sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)											
	Jumlah data dan/atau informasi stok sumber daya perikanan di WPPNRI	11	11	11	11	11						
	Data dan/atau informasi stok sumber daya perikanan pada WPPNRI di perairan darat											
	Jumlah data dan/atau informasi stok sumber daya perikanan pada WPPNRI di Perairan Darat	8	10	12	14	14						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah data dan/atau informasi pemetaan Sumber daya kawasan pesisir (kawasan)	10	10	12	12	13						
	Data dan/atau informasi pemetaan karakteristik dan dinamika laut di WPPNRI											
	Jumlah data dan/atau informasi pemetaan karakteristik dan dinamika laut di WPPNRI (paket)	2	2	3	4	4						
	Sarana dan prasarana riset kelautan											
	Jumlah sarana dan prasarana riset kelautan (unit)	7	7	7	7	7						
	Prototipe alat dan mesin hasil riset dan perekayasaan kelautan											
	Jumlah prototipe alat dan mesin hasil riset dan perekayasaan kelautan (paket)	4	4	4	5	5						
	Alat dan mesin hasil riset dan perekayaasaan kelautan siap guna											
	Jumlah alat dan mesin hasil riset dan perekayaasaan kelautan siap guna (paket)	1	1	1	2	2						
	Rekomendasi kebijakan hasil riset kelautan											
	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil riset kelautan (paket)	12	12	12	12	12						
	Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) hasil riset kelautan											
	Jumlah penerapan TAL hasil riset kelautan (paket)	1	1	2	2	2						
	Sarana dan prasarana riset data satelit radar											
	Jumlah sarana dan prasarana riset data satelit radar (<i>scene</i>)	500	500	500	500	500						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020-2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sarana dan prasarana stasiun bumi penerima data satelit radar											
	Jumlah sarana dan prasarana stasiun bumi penerima data satelit radar (unit)	1	1	1	1	1						
	Layanan penelitian dan pengembangan											
	Jumlah layanan penelitian dan pengembangan (layanan)	1	1	1	1	1						

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Martini

